ISSN 2962-956X

# Majalah SensorFilm

Informasi Sensor dan Film
Volume 20 No. 3, September 2024



# Energi Baru 2024-2028

## Pendidikan Moral Anak Lewat Karya Film

Scan Qr Code

ISSN 2962-956X

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

# ALUR PENDAFTARAN SENSOR FILM DAN IKLAN FILM



## 1 BUKA APLIKASI

Pemohon melakukan Registrasi Akun melalui sistem e-SiAS pada tautan https://sensor.kemdikbud.go.id/

## 2 PEMBUATAN USER ID

- Pemohon diperlukan membuat User ID untuk melakukan registrasi akun pada sistem e-SiAS, dengan memasukkan data diri pemohon dan perusahaan secara benar
- Pemohon akan mendapatkan email notifikasi apabila registrasi telah disetujui
- Pemohon masuk ke dalam sistem e-SiAS sesuai dengan User ID yang sudah diaktifkan





## 3 ISI DATA LENGKAP

isi data lengkap serta dokumen-dokumen pendukung yang akan diunggah ke sistem e-SiAS.



## 4 PENDAFTARAN SENSOR FILM DAN IKLAN FILM

- Pemohon mengisi data Film dan Iklan Film yang akan disensor.
- Pemohon mengunggah berkas pengajuan data sensor film dan iklan film
- Pemohon mendapatkan Bukti Pendaftaran Penyensoran



## 5 PENYERAHAN MATERI

Untuk ukuran materi < 50 MB, pemohon dapat mengunggah secara daring pada sistem e-SiAS

Untuk ukuran materi > 50 MB, pemohon menyerahkan materi secara langsung ke Kantor LSF atau mengirimkan link G-drive melalui email. **

Pemohon akan memperoleh konfirmasi dari Sistem e-SiAS

## 6 PEMBAYARAN

- Pemohon melakukan pembayaran secara manual melalui loket kasir di kantor LSF atau melalui metode transfer bank dengan e-Billing**)
- Pemohon mendapatkan bukti pembayaran (invoice)






## 7 PENERBITAN STLS

- Pemohon mendapatkan STLS maksimal tiga (3) hari kerja sejak dilakukan pembayaran, apabila tidak ada revisi dan catatan.
- Apabila ada revisi dan catatan, STLS akan diterbitkan jika pemohon sudah menyerahkan kembali materi yang sudah diperbaiki sesuai dengan revisi dan catatan. (maksimal tiga (3) kali perbaikan revisi dan catatan)
- STLS elektronik dapat diunduh pada sistem e-SiAS.

*) KETERANGAN

1. *Saat pendaftaran, pemohon wajib melampirkan Surat Rekomendasi Perizinan Film dan Iklan Film dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek*
2. *Pemohon wajib melampirkan Sinopsis/Storyboard dari film/iklan (dalam bentuk pdf)*
3. *Materi film/iklan tersebut (jika file berukuran < 50 MB, bisa langsung diunggah secara daring melalui sistem e-SiAS)*

**) INFORMASI LAYANAN

*No. Telepon : (021) 2524845 Whatsapp : 0821 2211 1830*
*Faksimile : (021) 2529285*
*email : esias@kemdikbud.go.id | fasilitasi.lsf@gmail.com*

Majalah SensorFilm
Informasi Sensor dan Film

ISSN 2962-956X
TERAS

# DAFTAR ISI

**TAJUK**
Era Baru Sensor Film 4

**FOKUS**
Energi Baru Menjaga Tontonan Bangsa 5

**SUDUT PANDANG**
Nurman Hakim : Saya Sempat Protes Ke LSF 10

**PROFIL ANGGOTA** 12
Hadi Hartomo
Telah Selesai dengan Diri Sendiri

**CATATAN ANGGOTA** 16
Festival Film Pelajar Jogja

**PROFIL TENAGA SENSOR** 21
Niken Larasati
Bekerja Menjadi Tenaga Sensor, Hal Yang Sangat Membanggakan

**KEGIATAN**
Sosialisasi BSM Di Serang, Banten 23
Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman di Kupang, NTT 25
Kunjungan LSF R.I ke Filipina 27

**APRESIASI**
Vina Sebelum 7 hari antara fakta dan film 32

**PANDUAN FILM** 36

**INFO SENSOR** 46

**Penerbit**
Lembaga Sensor Film RI

**Dewan Pengarah**
Naswardi
Noorca M. Massardi

**Penanggung Jawab Umum**
Tri Widyastuti Setyaningsih
Ervan Ismail
Kuat Prihatin

**Pemimpin Redaksi**
Nusantara Husnul Khatim Mulkan

**Wakil Pemimpin Redaksi**
Hairus Salim
Widayat S. Noeswa
Erlan Basri

**Penanggung Jawab Sekretariat**
Titik Umi Kurniawati
Ridwan Fahrudin

**Redaktur Pelaksana**
Indri Ariefiandi

**Staf Redaksi**
Refilia Nur Arafiana
Dita Ramayani
Eka Kartika

**Fotografer**
Akbar Arief Darmawan

**Desainer Grafis**
Ambi Darwis
I Dewa Gede Puja Trisuda

**Keuangan**
Fauzi Firmansyah

Scan Qr Code

**Alamat**
JL. Jenderal Sudirman, Gedung F Lt.6, Komplek Kemdikbudristek, Jakarta, 10270
Telp/Fax. (021) 2524845

sekretariat@lsf.go.id




**Ilustrasi cover :** Ambi Darwis

# ERA BARU SENSOR FILM

Dr. Naswardi.,MM., ME
(Ketua Lembaga Sensor Film)

ERA baru Lembaga Sensor Film (LSF) telah dimulai sejak dikukuhkan dan dilantiknya keanggotaan LSF periode 2024-2028 oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 28 Agustus 2024 di Kantor Kemendikbudristek.

Seluruh anggota yang telah dilantik langsung melaksanakan rapat pleno, hingga kemudian terpilih Naswardi sebagai Ketua LSF dan Noorca M Massardi sebagai Wakil Ketua LSF. Dengan membangun gagasan dan visi untuk menghadirkan LSF yang berkinerja, yang memiliki keseimbangan antara fungsi pemajuan industri, dengan fungsi pemenuhan serta perlindungan terhadap penonton.

Film sendiri saat ini menjadi salah satu alat efektif dalam diplomasi budaya. Salah satunya seperti dilakukan Korea Selatan melalui fenomena *Hallyu* atau *Korean Wave* lewat *K-Pop*, *K-Fashion*, *K-Food*, *K-Beauty*, *K-Film*, hingga *K-Drama* yang mengalir begitu deras dan dinikmati anak-anak muda Indonesia.

Di sisi lain, hal itu akan berdampak apabila publik tidak diberi sajian tontonan bermuatan lokal dan film nasional secara berimbang. Untuk itulah LSF menyusun cetak biru Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), yang kemudian disebut dengan Catur Aksi Budaya Sensor Mandiri. Yakni, masifikasi kampanye gerakan nasional Budaya Sensor Mandiri (BSM) melalui Gerakan *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School*, dan *LSF Goes to Community*, dengan jumlah sasaran yang telah dicapai sebanyak 20.000 orang, yang kemudian tergabung dalam komunitas #Sahabat Sensor Mandiri.

Aksi pertama, dengan memproduksi sebanyak mungkin konten bernuansa literasi, melanjutkan produksi 20 konten literasi tontonan BSM yang saat ini sudah tersedia, dan mempublikasikannya melalui berbagai media.

Aksi kedua, memperkuat kerja sama nasional dan internasional. Di mana LSF telah melaksanakan nota kesepahaman dengan 64 perguruan tinggi negeri dan swasta, tujuh kementerian/lembaga, lima pemerintah daerah, delapan organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Selain juga menjajaki kerja sama dengan Lembaga Penapis Filem Malaysia (LPF) dan Korea Media Rating Board (KMRB).

Aksi ketiga, menginisiasi program Desa Sensor Mandiri (DSM), di mana sejak 2020, telah diinisiasi tujuh desa di enam provinsi. Antara lain Desa Tigaherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; Desa Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur; Desa Gelanggang, Kabupaten Malang, Jawa Timur; Desa Karang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Desa Ambarketawang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Desa Pupuan, Kabupaten Gianyar, Bali.



Aksi keempat, melakukan survei nasional dan penelitian tematik tentang perfilman, kriteria penyensoran, dan BSM. Sebagai upaya untuk mewujudkan program yang berkualitas dan pelaksanaannya didasarkan pada hasil penelitian dan riset.

***Semua terus dilakukan dengan harapan literasi tontonan publik semakin meningkat dan berkualitas.***

# ENERGI BARU MENJAGA KUALITAS TONTONAN

*Semangat dan cita-cita menggelora, seiring terbentuknya formasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) 2024-2028. Kehadiran mereka diharapkan menjadi energi baru bagi dunia perfilman Tanah Air.*

Ade Fitri Yeni, Ahmad Raditya Sanggupri, Fitri Yani, dan Lailatul Ismi



LSF

**NADIEM MAKARIM MENGANGKAT SUMPAH ANGGOTA LSF 2024-2028.**
Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

SEBARIS kalimat disampaikan Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebelum mengangkat sumpah atas 17 orang anggota LSF RI periode 2024-2028 yang dilantik di Plaza Insan Pendidikan Berprestasi, Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kemedikbudristek, Jakarta, pada 28 Agustus 2024. "Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila, dan UUD 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahtaraan rakyat, " ucapnya.

Semua tentu mafhum bahwa sumpah mengandung konsekuensi, pun pekerjaan yang diemban seorang pejabat tentunya dibiayai negara. Karena itu, semua berpulang pada kinerja dan program yang harus diwujudkan demi menjalani tugas selaku penjaga tontonan masyarakat.

Optimisme atas formasi baru diungkapkan Ketua LSF periode 2020-2024 Rommy Fibri. Dia menilai, ke-17 anggota LSF periode saat ini, baik dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah sudah sangat sesuai. Baik dari komposisi kompetensi, usia, hingga semangat untuk maju bersama dan bekerja sama erat.



**ROMMY FIBRI HARDIYANTO.**
Bukan penafsir tunggal kebenaran dalam film.

Dia berharap, LSF dapat mempertahankan reputasi sebagai lembaga yang bukan penafsir tunggal kebenaran dalam film. Mengingat LSF adalah lembaga yang merepresentasikan masyarakat pada satu sisi, namun pada saat yang sama memiliki tanggung jawab utk memajukan dunia perfilman nasional sebagaimana diamanatkan UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. "Sistem dialog yang selama ini dijalankan, perlu dijaga konsistensinya," jelas Rommy.

Rommy pun meminta agar akses komunikasi lebih canggih dan proaktif, mengingat LSF seharusnya menjadi tempat rujukan utama dan pertama bagi siapa pun yang ingin mengetahui tentang film yang akan ditonton. "Makanya LSF harus tetap menjaga arus," ujarnya.

Dialog sendiri sebenarnya merupakan gerbang terakhir dalam proses penyensoran film di LSF. Karena prosesnya dimulai dengan menyaksikan film. Jika ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, maupun pedoman LSF, maka akan dicatat. Jika dianggap berat, film tidak akan diberi Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan harus direvisi, setelah itu film tersebut akan melalui proses resensor.

Jika pemilik film masih keberatan dengan keputusan LSF, maka bisa mengajukan dialog. Sebelum dialog, LSF akan menonton ulang kembali film dengan dihadiri perwakilan dari berbagai komisi dan pimpinan LSF. Dalam sesi dialog, pemilik film diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen atas keberatannya.

"Nah, dalam dialog itu nanti akan kelihatan, seberapa jauh mereka memahami film yang mereka buat," papar Ketua Subkomisi Dialog LSF Widayat S Noeswa.

Pihaknya, jelas anggota LSF yang baru ini, akan mendengarkan alasan pemilik film untuk mempertimbangkan kembali keputusan. Dia menekankan, fungsi utama dialog adalah mencari jalan tengah antara keputusan LSF dan keinginan pihak produksi sebelum STLS dikeluarkan. Namun, jika pelanggaran dinilai berat, maka LSF akan tetap pada keputusannya.

LSF, lanjut Widayat, bekerja berdasarkan aturan yang ada, yakni Undang-undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; serta Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2014 Tentang LSF. Namun, dia menegaskan bahwa LSF sangat mendorong kemajuan industri perfilman Indonesia.

Karena film, menurutnya tidak hanya berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Dia membandingkan dengan industri hiburan di Korea Selatan, Hollywood, dan Bollywood yang telah sukses mendunia. "Mari kita sama-sama membuat industri film kita maju. Tapi kita cuma mengingatkan, selain dengan tugas kita, fungsi kita, ada aturan yang berlaku," jelas Widayat.

**Menjamin Tontonan Masyarakat**

Salah satu persoalan yang ada di lapangan adalah tidak sedikit pengunjung bioskop yang belum memiliki kesadaran untuk menonton sesuai klasifikasi usia. Sementara belum ada payung hukum




**WIDAYAT S NOESWA.**
Mencari jalan tengah



LSF

**ANGGOTA LSF.**
Penjaga tontonan masyarakat.

yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada bioskop yang melanggar aturan .

Data terakhir, menunjukkan bahwa baru 46 persen masyarakat yang memperhatikan klasifikasi usia dalam menonton film. Untuk itu, di periode 2024-2028. LSF akan terus meningkatkan salah satu program unggulan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang telah dicanangkan sejak 2021. Di mana selain melakukan sosialisasi langsung ke kampus, sekolah, dan komunitas, juga mempercepat sosialisasi melalui media sosial, televisi, radio, dan siniar.

Selain juga akan mengembangkan sosialisasi berbasis komunitas melalui program Sahabat Sensor Mandiri. Tujuannya, memperluas cakupan sasaran literasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, seperti ditekankan Ketua LSF Naswardi, kerja sama dan sinergi menjadi penting. Tidak hanya dengan pemangku kepentingan di dalam negeri, seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi, tapi juga dengan lembaga-lembaga klasifikasi di tingkat ASEAN dan Asia.

Selain itu, lanjutnya, LSF membuat kebijakan berbasis penelitian dan kajian akademis, di mana setiap tahun, dilakukan riset terkait isu perfilman dan budaya sensor mandiri. Selain merancang berbagai program inovatif, termasuk membangun desa sensor mandiri sebagai program percontohan. Tujuannya, menurunkan nilai-nilai budaya sensor mandiri hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. “Termasuk penonton di komunitas, desa, perguruan tinggi, dan sekolah, “ jelas Naswardi.



*Istimewa*

**NASWARDI.**
Pentingnya kerja sama dan sinergi



Raditya Sanggupri

**ZAQIA RAMALLAH.**
Tertarik dengan kecerdasan buatan.

Untuk mencapai audiens yang lebih luas, Ketua Subkomisi Sosialisasi LSF Titin Setiawati menyebut pihaknya tengah merancang kampanye yang efektif dengan cara mendatangi lokasi yang dituju dan melibatkan tokoh atau ahli dari masyarakat setempat. Sehingga, sosialisasi tidak hanya berjalan satu arah, tapi juga mempertimbangkan situasi sosial dan isu-isu yang ada di masyarakat setempat.

Selain mengembangkan cara-cara baru, yang salah satunya dengan mengadakan sosialisasi yang melibatkan bioskop di sebuah wilayah, seperti kegiatan nonton film bareng, yang dilanjutkan dengan diskusi tentang GNBSM. "Pendekatan baru ini, diharapakan membuat sosialisasi lebih interaktif dan tidak hanya berjalan satu arah dari LSF kepada masyarakat, " ungkap Titin.

Sementara Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan LSF Zaqia Ramallah menargetkan penelitian kepada pelaku industri film, lembaga pendidikan terkait perfilman, dan masyarakat umum. Dia pun mengaku tertarik dengan penggunaan teknologi *articial intelligent* (AI) alias kecerdasan buatan dalam proses sensor film yang telah diterapkan di sejumlah negara.

Di sisi lain, meskipun teknologi AI dapat membantu mempercepat proses sensor, keputusan akhir, lanjutnya, bukanlah ditentukan mesin, namun tetap berada di tangan penonton alias manusia. "Dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi, LSF diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan industri perfilman dan masyarakat Indonesia di era digital ini," kata Zaqia.

Kebutuhan masyarakat yang semakin resah terhadap kemajuan teknologi informasi itulah yang menurut Wakil Ketua LSF Noorca Marendra Massardi membuat pihaknya ingin memastikan semua tontonan harus memiliki klasifikasi yang jelas. Mengingat di era digital saat ini, berbagai



LSF

**TITIN SETIAWATI.**
Merancang kampanye GNBSM

**NOORCA M MASSARDI.**
Desak DPR revisi UU Perfilman



LSF

tontonan dapat diakses secara bebas melalui ponsel pintar, sehingga setiap orang dapat mengakses konten yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka.

Untuk itu, dia mendesak anggota DPR periode 2024-2029 untuk segera merevisi UU Perfilman, guna mengoptimalkan pencegahan dampak negatif film di masyarakat. Termasuk jutaan film dan konten yang beredar di media sosial.

Noorca membeberkan, revisi atas UU tersebut, sebenarnya merupakan inisiatif DPR, yang sejak lima tahun lalu berada di urutan ke-101 Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menjelang akhir masa jabatan anggota DPR 2024-2029 hanya maju ke urutan ke-100. "Bayangkan, dalam lima tahun hanya bergerak satu langkah saja. Entah kapan UU perfliman ini bisa direvisi," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap peran LSF yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan tontonan yang semakin marak di jaringan informatika mampu terakomodasi. Sehingga, perlindungan terhadap generasi muda dari dampak negatif yang dapat muncul akibat tidak adanya batasan untuk mengakses berbagai konten dapat dilakukan.

Di sisi lain, LSF diharapkan tidak justru memberi batasan yang dapat menghambat para sineas dalam berkarya dan membuat film berdasarkan idealismenya. "Makanya, penting dialog di antara keduanya, *film maker* dan LSF, untuk saling memberi masukan. Karena banyak juga *film maker* yang tidak tahu norma dan aturan," ungkap akademisi Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (FFTV IKJ) Nurman Hakim.

LSF sendiri hingga kini terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan perfilman. Di mana secara periodik dalam setahun, empat kali rutin menggelar pertemuan dengan pimpinan rumah produksi, organisasi produser film, organisasi sutradara film, petinggi televisi, Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), serta kementerian/ lembaga terkait. **(Nuz)**




*Istimewa*

**Nurman Hakim**
Sineas dan Akademisi

# "Saya Sempat Protes ke LSF"

PENGALAMAN pertamanya membesut film lewat *3 Doa 3 Cinta* sekaligus menjadi 'pengalaman buruk' bagi Nurman Hakim saat berhadapan dengan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun, sineas ini kemudian mengakui bahwa LSF telah banyak berubah.

Dia pun memiliki sejumlah harapan kepada institusi yang diamanahi negara menjaga tontonan masyarakat tersebut. Kepada Salwa Nadira dan Ahmad Raditya Sanggupri dalam sebuah wawancara secara daring, akademisi Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (FFTV IKJ) ini menyampaikan sejumlah evaluasi dan pesan kepada LSF demi perbaikan di dunia film Tanah Air.

**Apa evaluasi Anda atas kinerja LSF terhadap dunia perfilman selama ini?**

Film itu bukan *part by part*, bukan bagian per bagian, tapi dari awal. Dari mulai *shot* pertama, kemudian dengan *shot* yang terakhir dari *scene* pertama, kemudian dengan *scene* yang terakhir. Itulah satu kesatuan.

Jadi, ketika LSF sekarang ini kan namanya klasifikasi, menekankan ke arah situ, bukan lagi pada penekanannya di pemotongan. Walaupun ada pemotongan, diserahkan kepada *film maker*-nya.

Jadi, dulu zaman saya bikin film pertama tahun 2008, saya sempat protes dengan LSF. Saya bertemu dengan pimpinan LSF tahun itu, karena film saya mau dipotong banyak. Saya mencoba menjelaskan, berdiskusi, tapi tampaknya mereka tidak malah diskusi, mereka hanya satu arah.

Tapi, sekarang ini mereka (LSF) mengundang para ahli untuk memberi masukan. Jadi, itu perubahan yang cukup signifikan. Ada keterbukaan, ada diskusi, mencoba untuk memperbaiki dirinya LSF saat ini.

**Periode mana yang memberikan perubahan signifikan dalam aspek penyensoran?**

Periode yang lalu, saat Pak Rommy (Rommy Fibri) menjadi ketua, mulai dilakukan perubahan. Tinggal kita lihat yang periode

sekarang ini, karena baru berjalan sebulan. Sampai kita tahu arahnya itu berusaha untuk menjadi lebih baik.

Mulai pada saat Pak Rommy kemarin dan beberapa anggota yang lama juga masih ada, seperti Mas Noorca, kemudian Ketua LSF sekarang Pak Naswardi.

**Harapan Anda terhadap LSF periode saat ini?**

Harapan saya sebagai *film maker*, (LSF) memperbaiki dirinya terus-menerus, meng-*upgrade* dirinya terus-menerus. Lalu kemudian menerima masukan-masukan dari pihak luar, terutama dari para ahli. Sehingga terjadi dialog dari *film maker*, para pembuat film dengan anggota LSF yang ditugaskan oleh negara.

Dan begitu pun sebaliknya, dari diskusi itu, anggota LSF bisa memberi masukan ke para *film maker*, bagaimana membuat film yang tidak melanggar norma maupun hukum yang telah disertakan oleh negara. Jadi, enggak cuma satu arah. Maksudnya, tidak hanya anggota LSF mendapatkan masukan, tapi juga nanti *film maker* akan mendapatkan masukan. Jadi, kayak semacam sosialisas.

Kalau enggak salah, itu sudah dilakukan dan terus akan dilakukan soialisasi ke para *film maker.* Yang pentingnya, apa namanya *self-censorship*. Jadi, sebelum film itu dibuat, *film maker* sudah punya *self-censorship*. Kalau saya buat seperti ini, maka konsekuensinya apa di masyarakat. Kalau saya buat seperti ini, sepertinya tidak layak secara norma untuk masyarakat, apalagi hukum.

**Saran Anda untuk LSF ke depannya?**

*Film maker* mampu memberi kontribusi atau pun membantu untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Hollywood, bagaimana semua *stakeholder* dalam industri perfilman bukan *film maker*.

Tapi juga kalau di Hollywood kan mereka menjadi sebagai lembaga sensor, tapi lembaga klasifikasi. Jadi, film itu klasifikasinya cocok ditonton 13 tahun ke atas, 13 tahun ke bawah, semua umur.

Jangan sampai lembaga ini (LSF) kemudian justru memberi batasan dramatik yang menghambat bagi para *film maker* yang ingin berkarya, dan membuat film berdasarkan apa idealismenya. *Film maker* ketika membuat film tidak bisa semena-mena dan tahu aturan, norma, hukum negara. Makanya, penting dialog di antara keduanya, *film maker* dan LSF, untuk saling memberi masukan. Karena banyak juga *film maker* yang tidak tahu norma dan aturan.

Jadi, dibikin caranya, dibikin kemudian ketika dikirim ke LSF, lalu melakukan pemotongan di sana sini, dan mereka melakukan protes. Dialog yang tidak hanya memberi manfaat bagi anggota LSF itu sendiri, tapi juga memberi manfaat bagi *film maker*. **(Nuz)**




**FILM PERTAMA.** Hendak dipotong banyak.

*Istimewa*

# Hadi Artomo

## TELAH SELESAI DENGAN DIRI SENDIRI

**Suhartini**

SEBAGIAN besar hidupnya nyaris tercurahkan untuk dunia film. Sejak lulus dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada 1977, Hadi Artomo, S.Sn, M.Sn, telah menghasilkan banyak karya. Di awal kariernya, dia menjadi director of photography (DOP) atau pengarah sinematografi di sejumlah film, seperti *Kejamnya Ibu Tiri Tak Sekejam Ibukota* (1981), *Pengantin Remaja II* (1982), *Putihnya Duka Kelabunya Bahagia* (1985), *Misteri Kebun Tebu* (1992), *Hati Seorang Wanita* (1994), dan *Kisah Nyata Dukun AS* (1997).

Selain juga sempat menjadi penata suara di film *Nagabonar* (1986) yang membuat film yang disutradarai MT Risyab itu memperoleh piala Citra FFI 1987, juga *Ayahku* (1987), *Irisan-Irisan Hati* (1988), dan *Bayi Tabung* (1988). Sejak 1990-an, Hadi mengerjakan film-film dokumenter info pembangunan Indonesia sebagai penulis skenario, sutradara, juru kamera, dan editor. Di antaranya *Masa Depan Milik Kita* (1986, memperoleh Piala Widya dalam FFI 1991), *Indonesia Emas* (50 tahun Kemerdekaan RI), dan *Menuju Tahun 2020* (APEC Bogor).

Hadi juga pernah menjadi Ketua Pokja Film Kompetitif Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2004/2005/2006), Anggota dan Wakil Ketua Komisi A Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (2003-2006/2006-2009). Serta juri di sejumlah ajang, seperti Juri Kategori Film untuk Televisi pada FFI 2011, Juri Kategori Film untuk Televisi pada KPI Award 2011, dan Ketua Dewan Bidang Penjurian FFI 2013-Semarang. Selain juga ikut dalam Delegasi Festival Film Indonesia di Melbourne, Australia (2011).

Tidak hanya di dunia perfilman, Hadi pun lama berkecimpung di dunia akademis, hingga pada 2000-2004 menjabat sebagai Dekan Fakultas Film dan Televisi (FFTV) IKJ dan pada 2004-2008 menjadi Wakil Rektor IV IKJ. Dia pun mengajar sebagai dosen tidak tetap di berbagai perguruan tinggi, seperti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Tarumanegara. Dan pada 2021-2024



**HADI ARTOMO.**
Tidak bisa membatasi.

Hadi Artomo

*Istimewa*

menjabat sebagai Wakil Direktur I-Politeknik Bhakti Semesta, Salatiga.

Sampai ketika lulusan Magister Seni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta ini memasuki usia 65, yang membuat sertifikasi dosen yang melekat padanya sudah tidak berlaku. Sehingga, dia mencoba mengikuti seleksi menjadi anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) periode 2024-2028 di usianya yang menjelang 70 atau batas usia pendaftaran. "Dengan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mengadu peruntungan, melamar untuk bergabung, proses yang hampir satu tahun mengantarkan saya dapat diterima menjadi anggota LSF," papar Hadi.

Kini Hadi menjabat sebagai Ketua Subkomisi Penyensoran LSF RI, yang akan memastikan program pelayanan penyensoran berjalan sesuai target rencana strategis organisasi dan prosedur operasional standar. Di mana dia berusaha memastikan penetapan penggolongan usia pada materi sensor sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.

Kelahiran Madiun, Jawa Timur, pada 14 Mei 1954 itu pun berusaha memastikan pelaksanaan materi yang membutuhkan peninjauan dan sensor ulang. Serta memastikan pelaksanaan diskusi dan diskusi pakar untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran.

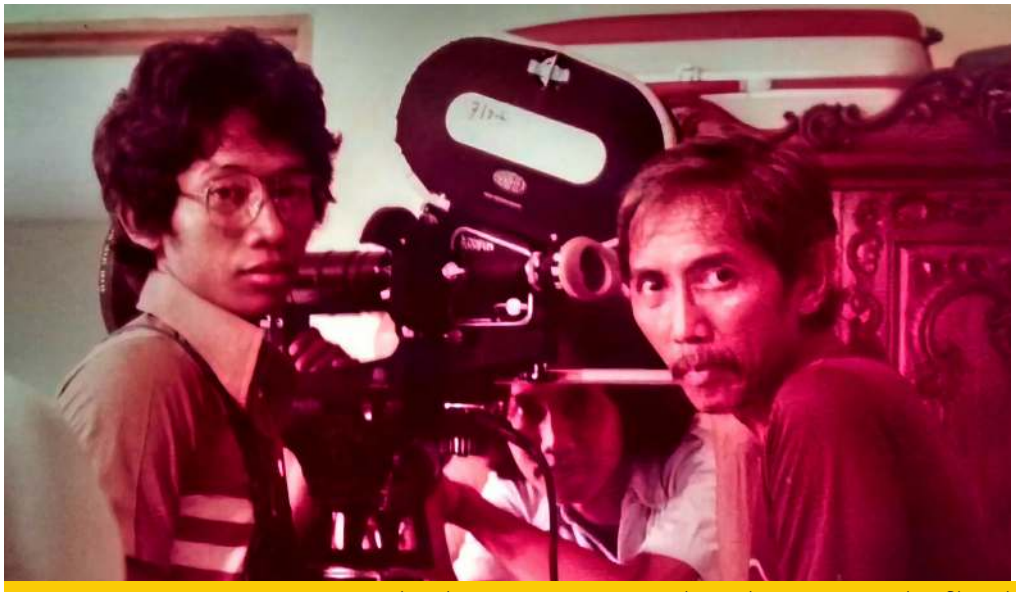
**Dilema Sensor**

Salah satu yang menjadi tantangan ketika menjadi anggota LSF, menurutnya justru nama lembaga itu sendiri, mengingat kata 'sensor' berkonotasi tidak demokratis. Apalagi jika meninjau dari sisi sejarah, di mana pada 443 SM, *censorship* merupakan lembaga yang mengatur akhlak penghuni Kota Roma. "Kalau kita mengikuti seperti apa yang ada di abad itu, ya enggak mungkin. Itu zaman dulu. Susah kita mau mengembalikan kata *censorship* seperti pada masa itu," ujar Hadi.

Berdasarkan catatan sejarah di Tanah Air pun, sensor film mulai diberlakukan pada masa Hindia Belanda di awal abad ke-20. Kehadiran bioskop di Tanah Abang menarik perhatian pihak kolonial Belanda yang khawatir bisa menampilkan konten film yang memberi pencerahan bagi penonton bumiputera.

Sehingga, pada 1916 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang film dan cara penyelenggaraan usaha '*gambar idoep*' lewat keberadaan lembaga bernama *Commissie voor de Kuering van Films* atau Komisi Pemeriksa Film (KPF). "Seperti yang disebutkan dalam Film Ordonantie No 276, sistem penyensoran dilakukan pada proses

*Istimewa*



**ASISTEN JURU KAMERA.** Bersama juru kamera Soetomo Ganda Soebrata saat syuting film Di Ujung Malam yang disutradarai Nico Pelamonia, 1979.

praproduksi melalui deskripsi film. Dan jika dianggap perlu, film ditunjukkan langsung kepada KPF," papar Hadi.

Kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda menguat, ketika bioskop membawa perubahan pandangan kalangan bumiputera terhadap kolonial Belanda. Padahal, sebelum kemunculan bioskop, mereka tidak tahu mengenai keburukan dan sejarah jatuh dan bangunnya bangsa-bangsa Eropa.

Kondisi itu membuat pemerintah kolonial merasa terancam kewibawaannya, sehingga Ordonantie 1916 berkali-kali merujuk pada perdebatan tentang hak-hak berkreasi. Mengingat UU itu dinilainya tidak lengkap, karena belum ada turunannya selain Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran serta Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2014 Tentang LSF.

Apalagi karena teknologi telah bergerak begitu cepat. "Di sini yang harus kita garis bawahi, bahwa persoalan yang sangat sulit untuk diperdebatkan adalah persoalan



Istimewa

**JURU KAMERA.** Syuting film 'Sumatera Selatan Membangun' yang disutradarai Dira Suhud, 1981.

mengalami pembaruan. Misalnya, perubahan mengenai aturan nilai yang boleh dan tidak boleh disematkan dalam film yang akan dikonsumsi oleh masyarakat bumiputera. Semua hal yang berbau kesusilaan, tata krama, menganggu ketertiban umum, tidak boleh diangkat, dan supremasi kulit putih menjadi nilai utama yang ditekankan dalam setiap film yang diproduksi.

Menilai penyensoran film saat ini, Hadi mengingatkan bahwa Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman sudah harus dipikirkan kembali, apakah perlu direvisi atau diperbaiki semuanya dengan bagaimana yang namanya lembaga sensor. Apakah lembaga ini bisa berlaku adil, ini yang tidak gampang," paparnya.

Sebagai sebuah rekayasa seni media rekam, film menurut Hadi bisa saja diartikan sebagai karya ilmiah, namun juga bisa diterjemahkan sebagai suatu bentuk kebohongan, sehingga menjadi sesuatu yang kompleks.

Rekayasa mengandung sesuatu yang tersurat-tersirat, tersirat-tersurat, dan perkembangan teknologi. Karena teknologi kamera dan penyuntingan terus berkembang seiring perkembangan luar biasa produk digital. Struktur cerita berbasis sosial vertikal

dan horizontal pun kini semakin kompleks. Perkembangan digital pun membuat tontonan tersedia di berbagai di platform media sosial, internet, dan *video on demand* (VOD). Sehingga, jika penyensoran masih mengacu ke UU No 33 Tahun 2009 tentu harus ada pembaruan, meskipun di sana secara tersirat menyebut "media lainnya".

Persoalan lainnya, lanjut Hadi, adalah klasifikasi usia penonton berdasarkan waktu tayang di televisi. Misalnya, ketika di wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB) sudah pukul 20.00, maka di wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA) sudah menunjukkan waktu pukul 21.00, dan di wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) sudah pukul 22.00.

"Ketika di WITA pukul 22.00, di sana sudah tayangan-tayangan 21+, sedangkan di WIB belum boleh. Ini menjadi kesulitas tersendiri pada tayangan. Kalau memberlakukan waktu setempat, bagaimana siaran bisa terpusat. Ini juga persoalan yang luas. Belum lagi, bagaimana masalah tingkat pemahaman dari masyarakat kita. Sudah wilayahnya luas, tingkat pemahamannya juga berbeda-beda," papar Hadi.

Untuk itu, LSF yang berfungsi melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, jelasnya, telah banyak membuat literasi. Persoalannya, bagaimana masyarakat dapat memilah, memilih, dan menetapkan tayangan yang sehat. "Kita tidak bisa membatasi. Kita harus bekerja sama dengan masyarakat, agar memiliki kesadaran penuh dalam memilah dan memilih serta menetapkan apa yang harus mereka tonton, " terangnya.

Untuk itu, Hadi mengutip sebuah falsafah suku Minahasa, "*Sitou timou tumao tou*" yang secara harfiah berarti, "Orang hidup menghidupi orang lain." Frasa itu pula yang selalu melekat pada benaknya dan sempat disematkan dalam karya salah satu film dokumenternya tentang pariwisata di Sulawesi Utara.

Dia mengartikan falsafah tersebut, bahwa setelah seorang manusia mampu menjadi pribadi yang mandiri, saat itulah tugasnya juga harus memanusiakan manusia di sekitarnya. "Jika telah selesai pengabdiannya pada diri sendiri, nah, saatnya mengabdi. Termasuk pada persoalan kelembagaan negara," tutup suami Sri Mulyastuti yang merupakan ibu dari Muladi Ajisasmito tersebut. **(Nuz)**



*Istimewa*

**PENATA SUARA.** Syuting film dokumenter 'Antara Hari ini dan Besok' di Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, yang disutradarai Henk Muller, 1985.

**HAIRUS SALIM**

Ketua Subkomisi
Desa Sensor Mandiri dan Komunitas
LSF RI

CATATAN ANGGOTA

# FFPJ

## Festival Film Pelajar Jogja
## Menjelang Dua Windu



Istimewa

**FESTIVAL KARYA ANAK MUDA**. Sudah 15 Tahun

Di kereta yang membawa saya pulang ke Yogya di akhir minggu, saya buka-buka akun media sosial. Kisah dan berita, sedih dan gembira, hingga yang sekadar curhat saja dari teman-teman berlewatan. Lalu mata saya tertuju pada sebuah ungkapan syukur dari seorang teman: "Ucapan syukur kepada Tuhan YME dan terima kasih tak terhingga kepada siapa saja yang telah berkenan menjadi sahabat Festival Film Pelajar Jogja sampai di hajatan ke-15 tahun ini. Sejak diinisiasi 2010, festival ini didedikasikan sebagai sarana pendidikan dan kebudayaan. Beragam dukungan menjadikan FFPJ masih bertahan sampai saat ini."

Oh. Saya berdecak. FFPJ ternyata sudah 15 tahun. Waktu demikian cepat berlalu. Sungguh tak terasa. Saya ingat dulu beberapa kali diundang mengisi acara workshop dan diskusinya. Kesan saya, FFPJ adalah event yang dilakukan secara partikeler, independen, sederhana, tapi penuh dengan suasana akrab dan semangat saling belajar. Dan karena mengusung film karya-karya anak muda yang baru mulai belajar membikin film, ia mungkin tak banyak mendapat perhatian. Kenyataan bahwa mereka bisa bertahan hingga 15 tahun menunjukkan ada semangat yang tak ternilai di balik penyelenggaraannya. Itu adalah semangat belajar dan silaturahmi.

Ketika membaca status itu, tiba-tiba nyelenong pesan WA: "Pagi, mas… Salam sehat & bahagia selalu. Weekend ini di jogja atau jkt? Kalau di jogja pengin ganggu

sebentar..." Pengirim pesan itu adalah Tomy Widianto Taslim. Dialah tokoh utama di balik penyelenggaraan FFPJ tersebut. Tentu saja saya menerima ajakannya untuk bertemu, selain sebagai silaturahmi sekaligus saya ingin mendengar 'kisah sukses'-nya bersama Ghalif Putra Sadewa, Rahmi Yulianita, dan Miftakul mengawal FFPJ hingga 15 tahun. Dan inilah ceritanya:

Ide awal FFPJ muncul ketika Tomy dan kawan-kawan menemukan ruang untuk belajar bersama di bidang seni film masih terbatas, khususnya untuk usia pelajar SMA. Tidak hanya di Yogya, tapi juga secara nasional. Setelah beberapa tahun sebelumnya ide itu cuma ada di pikiran, pada tahun 2010 mereka memberanikan diri membuka ruang itu dengan FFPJ. Mereka berharap festival ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi komunitas film pelajar Indonesia dan para pemangku kepentingan di sekitarnya. Mereka meyakini dengan silaturahmi akan banyak menambah sahabat dan berkah.



Istimewa

**TOMY WIDIANTO TASLIM.** Dukungan dari Para Guru

Ketika merintis FFPJ ini, Tomy mengaku mendapat dukungan para guru seni filmnya, almarhum Ki Hartanto dan Gotot Prakosa. Keduanya berasal dari Yogya yang berkegiatan film di Jakarta sejak tahun 70an, khususnya mengabdi di IKJ. Selain itu dukungan juga mengalir dari Pak Subagjo Budisantoso (IKJ), Alex Luthfi (ISI Jogja), keluarga besar FSMR ISI Yogya, dan masih banyak lagi. FFPJ –kata Tomy, yang alumni ISI Yogya dan S-2 IKJ ini-- berhutang banyak ke beliau-beliau itu, lahir dan batin.

Dua penyelenggaraan awal (2010-2011) digelar di museum Benteng Vredeburg, khususnya di ruang audio visual dan ruang seminar. Kemudian setiap tahun berpindah-pindah tergantung kesiapan sumber daya internal panitia. Paling sering digelar di Balai Pemuda Ambarbinangun, bekas sebuah pesanggrahan milik keraton yang kini juga menjadi tempat perkemahan pelajar di wilayah Yogyakarta. Sedangkan untuk penyelenggaraan ke-15 tahun 2024 ini di kampus UNU Yogyakarta dan perkemahan desa wisata Srikeminut, Imogiri, Bantul.

Meski menyandang nama 'Jogja', bukan berarti pesertanya dari kalangan pelajar atau sekolah di Yogya saja. Sejak pertama para pesertanya datang dari berbagai sekolah/daerah di Indonesia. Menurut catatan, hingga saat ini peserta yang pernah berpartisipasi dalam festival ini berasal dari Aceh, Lampung, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Ambon, Papua Barat, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, NTT, dan lain-lain.

Untuk menjaring peserta, panitia menyebarkan informasi secara terbuka via rilis media dan media sosial. Untuk berkomunikasi

dengan para pelajar yang berminat ikut serta, panitia mengandalkan jejaring sekolah/ guru pendamping. Para guru SMU/SMK/ MA dan home schooling sangat membantu menjembatani komunikasi mereka dengan para siswa yang punya minat berpartisipasi di FFPJ. Setelah 1 hingga 3 kali penyelenggaraan, para peserta tahun sebelumnya ini banyak berperan dalam menjaring peserta berikutnya. FFPJ dirintis secara independent dan semangat gotong royong. Tidak ada uang akomodasi atau transportasi dari panitia. Mereka mendorong dan meminta kemandirian para peserta. Panitia sejak awal juga berikhtiar mandiri. Peserta diharapkan mengikuti festival dengan gembira dan sukarela. Demikianlah, dengan sukarela para peserta datang ke Yogya dengan beaya sendiri. Panitia hanya membantu mencarikan penginapan dan konsumsi, itu pun jika diperlukan. Tapi sebagian mereka kadang ada yang nekat tidur di masjid atau terminal.





Istimewa

**INDIPENDEN DAN GOTONG ROYONG.** Bertema Tepaslira

Barulah belakangan dukungan untuk FFPJ datang dari beberapa pihak, secara personal maupun kelembagaan, termasuk dari pemerintah *via* dinas kebudayaan DIY. Dari sini FFPJ berupaya mengelola dana donasi/ bantuan untuk fasilitasi peserta, khususnya konsumsi & penginapan ala kadarnya. Seringkali di Pondok Pemuda Ambarbinangun. Selain dananya masih terbatas, juga agar tetap menjaga kebersamaan dan semngat silaturahmi. Jika dana cukup, peserta akan mendapatkan kaos + merchandise sederhana lainnya sebagai kenang-kenangan.Karena ini festival film untuk pelajar, maka konsepnya dikelola dengan memasukkan unsur edukatifnya. Setiap tahun panitia memilih tema. Tahun ini temanya "Tepa Salira" yang perwujudan ilustrasinya adalah para punokawan di dunia wayang.Sejak awal hingga sekarang FFPJ merancang program kompetisi nasional. Selain program ini juga ada sinema silaturahmi (pemutaran film keliling sekolah, khususnya di DIY), kelas ahli/masterclass, workshop, temu komunitas film pelajar nasional, forum pendidik film indonesia dan apresiasi seni.

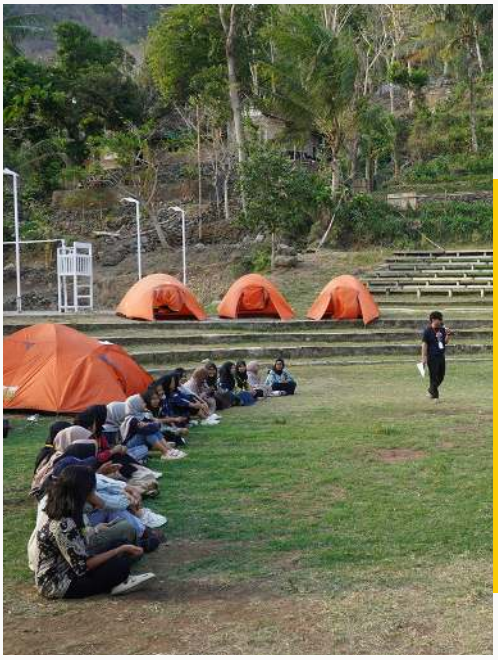
Pada FFPJ ke-15 2024 ini, Sinema Silaturahmi berlangsung di 8 (delapan) sekolah tingkat SMA di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah yang merupakan mitra program adalah SMKN 7 Yogyakarta, SMAN 2 Wonosari Gunungkidul, SMAN 1 Jetis Bantul, SMK Diponegoro Depok Sleman, SMA Bumi Cendekia Yogyakarta, MA Al Ichsan Nanggulan Kulon Progo, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan SMA Praxis Yogyakarta. Pemutaran film pendek pelajar terpilih dan dialog interaktif dilaksanakan 9 – 27 September. Partisipan kegiatan ini sekitar 400 pelajar terpilih dan berlangsung dinamis.

Sesi "Sinema Silaturahmi" selalu ramai dan favorit, karena pada sesi inilah para pelajar dan guru bisa bertemu dan berbincang dengan para praktisi dan akademisi/pengamat film. Ini menjadi kesempatan mereka untuk bertanya banyak hal sederhana seperti "apa syarat menjadi pembuat film", "ke mana sekolah lanjut kalau ingin menjadi pembuat film", "apa definisi film documenter" dan sejenisnya. FPPJ benar-benar merupakan ajang belajar bagi para pelajar yang meminati dunia film dan juga para guru yang memiliki program pembuatan film di sekolah.

Program menarik lainnya tentu kompetisi nasional, di mana karya-karya yang masuk sebelumnya diseleksi/dikurasi. Jumlah karya yang masuk naik turun, tapi rata-rata berkisar antara 60an-200an. Karya yang masuk ini kemudian dinilai lagi oleh juri utama untuk

menentukan karya terbaik. Tipe-kategori yang dibuka adalah fiksi, dokumenter dan eksperimental. Durasi tiap karya maksimal 10 menit (sudah termasuk credit title). Kemudian karya yang lolos/nomine ini diundang untuk menghadiri acara puncak. Tahun ini acaranya berlangsung selama 3 hari. Ketika dulu undangan disampaikan terbuka, yang datang cukup banyak. Pernah mencapai 400-500 orang. Sedangkan lokasi festival waktu itu sangat kecil. Setelah menimbang-nimbang, acara puncak yang diundang khusus peserta yngg karyanya lolos seleksi saja yang berkisar 100an orang. Tiap karya/sekolah dibatasi biar hari H tidak over. Ketika format acara diubah berupa kemah, jumlah peserta dikurangi lagi maksimal 50 orang.

Tahun ini karya terpilih di program kompetisi nasional FFPJ XV 2024 adalah sebagai berikut:



Istimewa

**KOMPETISI NASIONAL.** Hingga 200-an Judul

**Karya Fiksi**:

I; Prestasi Berdarah, SMA KRISTEN EBEN HAEZAR, Manado, Sulawesi Utara

II; Perbedaan Menyatukan Semua, SMAN 3 SINGKAWANG, Kalimantan Barat

III; Urai, SMK PRESTASI PRIMA, DKI Jakarta

IV; Kekancan, SMK PGRI 3 MALANG, Jawa Timur

V; Pepali, SMKN 7 YOGYAKARTA, Daerah Istimewa Yogyakarta

**Karya Dokumenter**

I; Mentari Sang Penakluk Gelombang, SMKN 7 AMBON, Maluku

II; Bendera Sholawat, SMK AL FATAH BANJARNEGARA, JawaTengah

III; Nyusuh, SMAN 60, DKI Jakarta

**Karya Eksperimental**

Atirath, SMKN 1 WONOSARI, GUNUNGKIDUL, Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama 15 tahun FFPJ hadir rutin tiap tahun. Tentu banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah susahnya membangun tim volunteer yang bersedia meluangkan energi dan waktu lebih untuk tidak sekadar kerja event/teknis. Jumlah volunteer yang diperlukan terutama pas penyelenggaraan antara 30-40 orang. Volunteer datang dari beragam latar



Istimewa

**BUKAN KEGIATAN KHUSUS.** Tidak menargetkan alumni.

belakang. Kebanyakan mereka mahasiswa, tapi ada juga yang sudah bekerja/karyawan dan sedikit pelajar sekolah menengah.

Rekruitmen volunteer dilakukan kadang menggunakan publikasi resmi. Kadang juga dari mulut ke mulut melalui para volunteer tahun-tahun sebelumnya. Keduanya dijalani sesuai kebutuhan. Tidak selalu bekerja bersamaan, sesuai dengan jobdesc-nya saja.

Selain soal volunteer, tantangan lainnya adalah memberikan pengertian ke calon partisipan festival, khususnya di program kompetisi nasional bahwa riset itu penting. Di FFPJ, justru ini langkah awal yang perlu dilakukan calon partisipan. "Membaca" tema, "menafsir" tema, melakukan riset berkaitan dengan tema, kemudian menyusun cerita/naskah untuk filmnya. Jadi harapannya karya film yg dilahirkan merupakan output dari proses riset yang dijalani sebelumnya.

Karena itu, meski bukan kegiatan khusus, jika ada calon peserta yg butuh ditemani untuk berproses mereka siap mem bantu semampunya. Misal para calon peserta itu butuh konsultasi cerita, teknis produksi, dll., mereka coba bantu memberi altarnatif-alternatifnya. Kalau masih di seputar Yogya, mereka sambungkan dengan teman-teman film yang bisa medampingi lebih intens seperti dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun 2024 ini, ada 1 yang seperti ini di Jogja. Tapi kalua dari luar Yogya, konsultasi dilakukan secara jauh online.

FPPJ telah berlangsung 15 tahun. Hampir setiap tahun ada alumni FFPJ dari luar kota yang lanjut kuliah di Yogya. Umumnya mereka ingin masuk jurusan film di ISI Yogya khususnya atau di kota lain. Ada yang diterima, ada juga yang tidak. Rata-rata yang lanjut kuliah di Yogya kemudian bergabung jadi volunteer.

Beberapa alumni yang sudah lulus kuliah jadi praktisi film, penulis naskah, kamerawan, editor, animator, dll. Sebagian ada yang sudah jadi dosen/guru. Ghalif yang sekarang jadi salah seorang panitia inti FFPJ adalah peserta FFPJ ke-2 tahun 2011. Sekarang dosen film di ISI Jogja. Ada juga Della dari Ciamis yang jadi dosen di ISBI Bandung & sekarang sedang ambil S3 di ISI Yogya.

Pada prinsipnya FFPJ tidak pernah menargetkan alumni harus masuk di dunia film. Mereka bebas menentukan mau berproses lebih lanjut di bidang mana yang mereka suka. Kenyataannya, ada juga peserta FFPJ yang ikut festival dengan alasan ingin menambah teman dan memperluas jaringan. Apapun juga FFPJ merupakan festival yang penting dan punya kontribusi nyata pada dunia film Indonesia. Tahun depan mereka akan memasuki dwi windu. Tema perayaan dwi windu sudah ditentukan yaitu "Gugur Gunung." Dalam kondisi apapun, mereka berharap festival bisa terus hidup dan menjadi teman berproses komunitas pelajar Indonesia yang menyukai seni film. Harapannya teman-teman, sekolah-sekolah dan para pelajar yang selama ini mendukung dengan caranya masing-masing juga tidak bosan dengan FFPJ.

FFPJ

# PROFIL
TENAGA
SENSOR

# Niken Larasati



Istimewa

**TENAGA SENSOR LSF.** Hal yang sangat membanggakan

MEMILIKI keyakinan bahwa setiap orang harus mengarahkan kehidupannya sesuai peta bakat dan potensi, Niken Larasati, A.Md, S.Sos, merasa bahagia karena telah mewujudkan mimpinya untuk bekerja di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI).

"Bekerja di LSF dan menjadi tenaga sensor adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya, karena ini adalah cita-cita saya," ungkapnya.

Merasa memiliki peta bakat di bidang analisis dan pengelolaan tim, dan pelaksanaan peraturan yang dapat dipercaya, Niken kemudian merancang karier lanjutan setelah fase domestik usai. Karier yang ditargetkan haruslah merangkum semua langkah dan hasil kehidupan sebelumnya, yang mencakup potensi serta minat dan bakat. Sehingga, karier haruslah menjadi periode dan tempat dia dapat berkontribusi paling maksimal.

Selain menempuh studi di program D3 Bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) sejak 1995, dia juga mampu menuntaskan pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Periklanan, FISIP UI, pada 2000. Bahkan di periode itu, Niken pun mampu menuntaskan tugas akhir bersamaan dengan menjalani magang berbayar di sebuah perusahaan, dan berhasil lulus tepat waktu.

"Sewaktu bekerja di perusahaan, saya mampu mengelola lima proyek film dan 52 judul film televisi, tiga proyek korporat serta BUMN selama kurun waktu tiga tahun. Meski penampilan saya waktu itu mirip zombi, tapi saya puas," ujarnya sembari tertawa.

Pada 1999 saat memulai penulisan skripsi, Niken mendaftarkan diri sebagai relawan di Litbang Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Kemudian pada 2000, dia berkarier di anak perusahaan Indosat sebagai salah satu staf kreatif Divisi Komunikasi Korporat, yang menangani konten komunikasi korporat, di antaranya Indosat Net, Semen Gresik, Yayasan



Istimewa

**KEHADIRAN LSF.** Andalan untuk memfilter dampak negatif tayangan publik

Sampoerna, Otorita Batam, dan Telkomsel. Sebelum memasuki rumah produksi di bawah Falcon Pictures untuk terlibat menangani proyek FTV, komunikasi korporat, dan layar lebar sebagai produser lini.

Ibu dari Najla Manohara, Naurah Maringipeni, dan Noah Manggalya ini pun pernah menjadi Koordinator Sentra Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Niken mengelola 10 siswa ABK di empat sub unit, membawahi enam guru selama lima tahun, bermitra dengan dua lembaga konsultan, dengan 10 kali hasil laporan kerja menunjukkan terjadinya perkembangan signifikan pada pelaksanaan Program Pengembangan Individu.

"Itu semua saya jalani tanpa latar belakang formal linier. Tapi saya bisa dan diakui oleh kolega yang kompetensinya memang di ranah pendidikan ABK," ungkapnya.

Dari berbagai profesi yang pernah dijalaninya, Niken pun mendapat berbagai sertifikat. Di antaranya sertifikat kompetensi sebagai Manajer Produksi, mengikuti pelatihan Program Pengembangan Individual, pelatihan Pemetaan Bakat ABK, pelatihan Stimuli Fonik Anak Usia Dini, dan pelatihan Stimuli Motorik Usia Dini (tingkat dasar).

**Makna Sensor**

Sempat jeda dari kesibukannya pada 2014 karena ingin berkonsentrasi pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Hingga akhirnya LSF-RI membuka peluang untuk posisi tenaga sensor (TS) periode 2024-2028 yang merangkum perjalanan kariernya selama 17 tahun beraktivitas di bidang produksi materi tayangan publik, bidang pelayanan, pengajaran, dan pendidikan. Selain juga bidang analisis dan penelitian.

"Pekerjaan tenaga sensor juga termasuk profesi unik yang jarang diketahui publik. Sehingga sesuai dengan prinsip untuk menjadi pembelajaran seumur hidup, dan selalu menjadi produktif dalam lingkungan pencerah," papar Niken.

Di sisi lain, dia menilai secara definisi, istilah sensor memang bertolak belakang dengan demokrasi. Karena secara alamiah akan selalu berseberangan dengan pemilik konten dan tak pernah ada di satu rel dengan ranah kreatif. "Namun, saat kita berpikir melampaui istilah, maka kehadiran LSF harus kita akui masih menjadi alat negara yang kita andalkan untuk melakukan filter atas dampak negatif industri tayangan publik," beber Niken.

Selama saya menjadi ibu, pendidik, dan konselor orangtua, dia mendapatkan wawasan bahwa masyarakat khawatir dengan pola pikir, pola perilaku, nilai-nilai, dan budaya belajar yang makin melemah. Di mana salah satu penyebabnya adalah derasnya aneka tayangan publik yang tidak semuanya sesuai dengan nilai keluarga dan lembaga pendidikan. "Di sinilah LSF dan masyarakat memiliki irisan kepentingan," tandas Niken. **(Nuz)**

# PENDIDIKAN MORAL ANAK MELALUI FILM

## SOSIALISASI GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI DI KOTA SERANG, BANTEN

Rudiyanto

LEMBAGA Sensor Film (LSF) terus menggencarkan kampanye Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dalam memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia. Ini merupakan salah satu upaya LSF dalam menjalankan fungsinya melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat peredaran dan penayangan film serta iklan film yang tidak sejalan dengan prinsip, arah, dan tujuan perfilman Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat a Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Apalagi di era digital saat ini, masyarakat dengan mudah mengakses berbagai tayangan film baik film nasional maupun manca negara dari berbagai platform digital dan jaringan teknologi informatika.

Kegiatan GNBSM tersebut dilaksanakan pada Senin, 26 Agustus 2024 di Serang, Banten, bertempat di Ratu Horison Ultima Hotel. Dalam kegiatan ini LSF bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan mengudang berbagai kalangan masyarakat. Di antaranya perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, mahasiswa UIN Serang, para guru dan siswa SD,SMP dan SMA serta para wartawan dari berbagai media di Kota Serang, di antaranya Media Banten, Radar Banten, Banten Raya, Koran Banten, RRI, TVRI, dan Banten TV. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi, S.KM.

Ketua Komisi I Bidang Penyensoran Dr. Nasrullah saat membuka kegiatan ini mengungkapkan bahwa setiap tahun LSF rata-rata melakukan penyensoran terhadap sekitar empat puluh ribu judul film dan iklan film yang tayang di gedung bioskop, media televisi dan media lainnya. "Setiap hari, saya menonton film dari pagi hingga sore, dan mata saya sudah bertambah plus dua karena rutinitas ini," ujar Nasrullah. Anggota LSF dari perwakilan Kementerian Agama ini juga menekankan pentingnya melestarikan budaya lokal melalui film. Karena budaya lokal merupakan aset bangsa yang harus dikembangkan melalui karya film. Meski demikian setiap film dan iklan film yang diproduksi dan di tayangkan, harus sesuai aturan yang berlaku terutama terkait isi atau konten. "Kami juga selalu memantau tayangan televisi dan bioskop untuk memastikan bahwa kontenya sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya

**Pentingnya Literasi**

Dalam paparannya, Ketua Sub Komisi Apresiasi dan Promosi LSF, Joseph Samuel Krisna, SH mejelaskan bahwa film






memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Karena itu kita harus berhati hati memberikan tontonan kepada golongan usia tersebut karena mereka masih berada pada fase imitasi atau meniru terhadap apa yang dilihat dan diengar. Joseph merujuk hasil penelitian Albert Bandura melalui Bobo Doll eksperimen di tahun 1961 dan 1963, dimana anak memiliki kemampuan meniru atau mengimitasi apa yang mereka lihat dan dengar. Oleh sebab itu kita harus menyediakan totonan yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Joseph menegaskan ada beberapa cara untuk melindungi anak dari dampak negatif film. Di antaranya dengan mendampingi anak saat menonton, memberikan edukasi agar menonton sesuai usia, memilihkan konten yang layak, menggunakan fungsi *Parental Key* atau *password*, mengatur jam menonton anak, melakukan kegiatan bersama sebagai pengganti waktu menonton atau mengakses media sosial dan menggunakan konsep *reward & punishment*, atau memberikan sanksi kepada yang melanggar dan mengapresiasi kepada yang taat aturan.

Sementara itu Komisioner KPI Evri Rizqi Monarshi mengingatkan kepada para orang tua untuk mendampingi anak-anak saat menonton televisi, agar mereka menikmati tayangan yang sesuai usia dan terhindar dari pengaruh buruk program televisi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan tayangan televisi yang dianggap tidak sesuai atau melanggar ketentuan melalui saluran resmi. Jika ditemukan pelanggaran KPI memastikan akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Menonton Sesuai Usia**

Sekretaris Komisi I LSF RI Hafidah, M.Pd yang hadir dalam kegiatan ini juga mengingatkan bahwa semua film yang ditayangkan di berbagai media termasuk di media digital, harus menampilkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebagai bukti bahwa film tersebut sudah melalui proses sensor di LSF. Hafidah menambahkan, STLS diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan penilaian mengenai kelayakan sebuah film sebelum dipertontonkan pada khalayak, sesuai dengan Undang-Undang Perfilman No.33 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014 dan Permendikbud No. 14 tahun 2019. STLS merupakan panduan bagi masyarakat dalam memilah dan memilih tontonan sesuai kriteria usia.

Kegiatan kampanye GNBSM tersebut ditutup oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Serang, Evie Shofiyah Usman, S.Pd, M.Pd. Evie mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan budaya menonton yang sesuai dengan usia, sehingga tayangan film yang disaksikan anak-anak dapat memberikan dampak positif. " Informasi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para guru dan siswa dapat memahami pentingnya memilih tayangan film yang berkualitas dan sesuai usia," ujar Evie.

Pesan penting dalam kegiatan kampanye GNBSM di kota Serang ini adalah menekankan pentingnya film yang mengandung nilai moral untuk membantu membentuk karakter anak. Tayangan film diharapkan memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak. Selain itu, para sineas dan pegiat film di daerah juga didorong untuk terus berinovasi dan bersemangat dalam memproduksi film dan konten yang berkualitas, sesuai dengan klasifikasi usia penonton, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama anak anak. **(Wid)**







BSM di Kota Serang Bersama KPI: Para pendidik dan Media diharapkan Membantu kampanye Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri

LSF

# LITERASI HUKUM PENTING BAGI SINEAS DAN PEGIAT FILM DI DAERAH

## LITERASI DAN EDUKASI HUKUM PERFILMAN DI KUPANG, NTT

**Suhartini**




LSF

**GNBSM DI KUPANG**. Dihadiri akademisi dan sineas lokal

PARA sineas dan pegiat film di daerah perlu mendapatkan literasi hukum, agar menghasilkan produk film yang berkualitas. Literasi hukum sangat diperlukan untuk memastikan, bahwa pelaku-pelaku perfilman di daerah, memahami regulasi, sehingga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukum. Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fahrensy P. Funay M.Si, saat membuka acara kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran, Lembaga Sensor Film (LSF) RI pada 15 Agustus 2024, di Hotel Sotis Kupang. "Kami menyambut baik kegiatan yang diselenggaran LSF untuk masyarakat NTT khususnya untuk para akademisi, para sineas dan pemerhati film," ujarnya

Fahrensy menambahkan literasi dan edukasi hukum bidang perfilman merupakan langkah strategis, dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif tayangan film dan iklan film. Surat tanda lulus sensor (STLS) yang dikeluarkan LSF merupakan bukti bahwa sebuah karya film sudah melalui proses sensor. Namun demikian masih dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tontonan yang berkualitas, serta memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan kategori usia. " Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan serta pengetahuan terhadap film melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian untuk menonton film sesuai klasifikasi usia maupun peruntukannya," ujar Fahrensy.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kalangan, di antaranya para akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Universitas Katolik Widya Mandira (Unika), para sineas, pegiat film dan teater lokal. Kegiatan ini menghadirkan nara sumber Ketua Subkomisi Apresiasi Dan Promosi, Joseph Samuel Krishna, SH




**ERVAN ISMAIL.** Dukung Perkembangan dan pertumbuhan perfilman nasional.

Godlief Richard Poyk, dengan moderator Ketua Sub Komisi Dialog Noorca M Massardi.

**Film Sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa**

Dalam paparannya, Joseph menyatakan, film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam ketahanan budaya dan kesejahteraan masyarakat. Film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional. Film di era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari konten negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa. Karena itu negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk film dan iklan film layak ditonton dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu, Richard Poyk menekankan pentingnya memberikan literasi kepada masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan terkait film dan industri penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga negara yang diberi amanah untuk mengawasi industri penyiaran, juga harus mampu melindungi masyarakat dari pengaruh negatif tayangan televisi. Karena itu, salah satu upayanya adalah memberikan literasi dan edukasi bagi masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan kategori usia. Richard Poyk menambahkan lembaga penyiaran wajib memberikan pendidikan dan pengetahuan melalui berbagai program siaran, baik program pemberitaan atau news, drama maupun non drama bahkan juga melalui *publik service Announcement* (PSA) atau Iklan Layanan Masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu Noorca M Masardi. Para peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan, untuk mendapatkan *insight* atau wawasan dari para nara sumber, terutama karena masih banyak dari mereka yang belum memahami aspek hukum secara detil mengenai dunia film dan penyiaran.

**Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri**

Acara ditutup oleh Wakil Ketua LSF, Dr. Ervan Ismail. Ervan menjelaskan bahwa salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh LSF adalah memajukan perfilman nasional. Karena itu LSF hadir ke berbagai daerah termasuk NTT bukan hanya untuk melakukan sosialisasi mengenasi penyensoran, namun juga merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan dan pertumbuhan pefilman di Indonesia.

Ervan menambahkan perkembangan industri perfilman di tanah air, cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah penonton pada tahun 2024 hingga bulan Agustus tercatat sudah mencapai 60 juta orang. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persennya menonton film Indonesia. Dengan demikian bisa dikatakan film Indonesia telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu perlu terus dilakukan literasi dan edukasi tentang persolan-persoalan yang terkait dengan regulasi dan hukum perfilman. Ervan mengakui, saat ini para sineas muda di berbagai daerah, muncul dengan mengangkat budaya lokal dalam karya filmnya. Hal tersebut tentu akan berdampak positif terhadap sektor lainnya terutama sektor pariwisata. "Kita berharap potensi-potensi di NTT yang luar biasa terutama tentang keindahan alamnya, budaya dan adat istiadatnya bisa terangkat di dalam cerita film, baik dalam bentuk kreativitas karya sineas-sineas lokal, film nasional atau bahkan Internasional," ujar Ervan.(Wid)

# KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PENENTUAN KLASIFIKASI USIA FILM

## Kunjungan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) ke Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) Republik Filipina

Tri Widyastuti Setyaningsih dan Joseph Samuel Krishna

Pada tanggal 16 - 19 Juli 2024, Anggota LSF periode 2020 – 2024 melakukan kunjungan kerja ke Filipina dengan dua agenda yaitu, berkunjung ke salah satu group media terbesar di Filipina bernama GMA Network, dan kunjungan utamanya yaitu ke Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) di Filipina, instisusi pemerintah yang berwenang me-*review* dan menentukan klasifikasi usia film seperti LSF di Indonesia.



**KUNJUNGAN LSF KE FILIPINA.** Diterima Duta Besar RI untuk Filipina Agus Widjojo di KBRI Manila.

MENGAWALI kunjungan kerja tersebut, 6 (enam) delegasi LSF yang terdiri dari: Rommy Fibri H. (Ketua LSF), Nasrullah (Ketua Komisi I LSF), Roseri Rosdy Putri (Sekretaris Komisi II LSF), Tri Widyastuti Setyanigsih (Ketua Subkomisi Penyensoran), Joseph Samuel Krishna (Ketua Sub Komisi Promosi dan Apresiasi), Abu Chanifah (Sekretariat LSF), dan Sofyan Hadi (Staff sekretariat LSF) terlebih dahulu menyambangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila. Kunjungan diterima langsung oleh Duta Besar RI untuk Filipina, Letjen (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh staff kedutaan terkait, yang menjadi kesempatan bagi kami untuk bertukar pikiran mengenai perfilman di Filipina khususnya dan Asia umumnya. Sekilas mengenai sosio – antropologi Filipina diperkenalkan oleh Duta Besar, mulai dari sejarah penduduk asli Filipina, migrasi penduduk dari Asia dan Melanesia, masa-

masa kolonialisme Spanyol hingga dampak perang dunia kedua bagi Filipina yang pernah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat karena berada di tengah – tengah medan pertempuran yang dekat dengan Jepang.

Dari sisi perfilman dan industri hiburan, terdapat kemiripan selera antara Filipina dan Indonesia. 2 (dua) genre yang paling banyak peminatnya disini adalah drama percintaan dan horor. Duta Besar menyampaikan bahwa saat ini KBRI memberikan kontribusi bagi pengenalan seni, khususnya film Indonesia di Filipina, yaitu dengan melakukan pemutaran film Indonesia secara berkala. Film-film ini tidak hanya ditunggu-tunggu oleh diaspora Indonesia, tetapi juga masyarakat Filipina. Dalam kesempatan ini LSF menyampaikan untuk siap sedia menjembatani KBRI dengan *production house* di Indonesia agar dapat memperoleh film-film yang bisa diputar pada kegiatan-kegiatan seni KBRI Filipina.

Selanjutnya kunjungan beralih ke GMA Network, yang merupakan group media terbesar di Filipina. Tidak terbatas pada produksi di bidang televisi, GMA juga menjadi penyedia konten untuk ditayangkan sebagai *video on demand* (VOD) dengan fokus utama GMA Network pada *news* dan *entertainment*.




**DISKUSI DI GMA NETWORK.** Bangkit setelah pandemi

Kunjungan LSF ke GMA diterima oleh Nessa Valdellon selaku Executive Vice President GMA Network dan tImnya. Dalam kunjungan tersebut, kami banyak berdiskusi mengenai perkembangan perfilman kedua negara, termasuk juga tantangan masuknya film asing baik dari asia, eropa maupun Hollywood. Nessa menyampaikan bahwa saingan terbesar bagi produksi film dalam negeri adalah adanya film-film dari Hollywood dan Korea. Pemasaran kedua konten ini ke Filipina sangat masif karena sangat diterima oleh masyarakat setempat. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi media lokal apalagi di tengah kondisi perfilman dan pertelevisian Filipina yang sedang berjuang bangkit sejak pandemi covid-19.




**GMA NETWORK MANILA, FILIPINA.** Ada kesamaan minat.

Fakta menarik yang kami dapatkan dari GMA yaitu bahwa Indonesia menjadi tujuan utama dari pemasaran film Filipina di Asia Tenggara. Mengapa? Pertama tentu saja karena besarnya jumlah populasi di Indonesia serta tingginya minat menonton. Baik tontonan di televisi maupun VOD di platform OTT menjadi kedua sasaran film Filipina di Indonesia. Beberapa sinetron asal Filipina bahkan baru-baru ini selesai ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Kedua adalah adanya kedekatan dan kemiripan aspek sosiologis antara Indonesia dan Filipina. Hal ini membuat adanya kesamaan minat pilihan tontonan masyarakat dua negara. Sinetron drama percintaan dan drama *action* dari Filipina sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

Tujuan LSF berikutnya adalah kunjungan ke MTRCB yang didirikan sejal tahun 1929 dan telah empat kali berganti nama. Mirip dengan LSF-RI, MTRCB merupakan lembaga negara yang diberi mandat untuk melakukan *review* dan memberikan klasifikasi usia atas film di Filipina. MTRCB terdiri dari *Chairperson, Vice Chairperson* dan beranggotakan 30 anggota yang dipilih langsung oleh presiden. Tidak hanya me-*review* film bioskop, MTRCB juga melakukan penilaian atas materi yang ditayangkan di televisi seperti series.

Kunjungan delegasi LSF disambut hangat oleh Ms. Morella Maria Soto - Antonio selaku Chairwoman MTRCB, Mr. Paulino E. Cases, Jr selaku Vice Chairman MTRCB; Mrs. Racquel Maria S. Cruz dan beberapa *board member* lainnya. Sebelum diskusi mendalam, MTRCB mengundang kami untuk melihat kantor dan studio yang digunakan untuk me-*review* film. Mini studio yang nyaman dengan kualitas gambar dan suara sama dengan di bioskop adalah kesan kami saat tur melihat studio MTRCB. Setiap ruangan dibuat kedap suara dan disertai dengan perangkat teknis yang *proper* untuk mendukung para *board of member* MTRCB dalam bertugas.



**MTRCB**.Tur melihat studio dan aktivitas pemantauan film.

Dalam menjalankan tugasnya, MTRCB memiliki visi yaitu: “Lembaga yang dinamis yang akan mendukung terciptanya bangsa dengan penonton Filipina yang terinformasi dan berdaya, bekerja sama dengan industri film dan televisi yang bertanggung jawab dan berkembang pesat".
Selain itu MTRCB juga memiliki misi sebagai berikut:

1. Melindungi anak-anak Filipina dengan memberdayakan keluarga melalui kampanye dan penyebaran informasi yang intensif untuk belajar mengevaluasi dan membuat pilihan yang tepat serta cerdas terkait konten media dan hiburan.

2. Mendidik dan secara sadar menciptakan mitra orang tua dalam peninjauan dan pemantauan konten televisi dan film.

3. Mempromosikan lingkungan pengaturan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dengan lembaga ini sambil meningkatkan kepatuhan pemangku kepentingan serta keterlibatan mereka dengan tujuan lembaga.

4. Menegakkan dan mempromosikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Filipina dalam peninjauan dan klasifikasi film, program televisi, dan materi publikasi.

5. Mendukung budaya pengaturan diri yang otentik dan bertanggung jawab dalam industri film dan televisi.

6. Mendukung inklusivitas dalam diskusi tentang tontonan keluarga di era digital melalui keterlibatan berkelanjutan dengan orang tua, siswa, pendidik, praktisi media, dan influencer media sosial.

7. Mendorong dan memelihara kemitraan serta kerja sama lokal dan internasional untuk pengembangan industri film dan televisi yang bertanggung jawab namun kompetitif secara global.

8. Meningkatkan standar dan semangat pelayanan sumber daya manusia lembaga tersebut.

MTRCB memiliki 6 klasifikasi usia, yaitu sebagai berikut:

1. G atau semua umur;

2. PG (*parental guide*), yaitu untuk anak dibawah usia 13 tahun;

3. R-13 (*rating* 13), yaitu untuk anak berusia 13 tahun keatas;

4. R-16 (*rating* 16), yaitu untuk remaja berusia 16 tahun keatas;
5. R-18 (*rating* 18), yaitu untuk dewasa berusia 18 tahun keatas; dan
6. X , yaitu untuk film yang dilarang dipertunjukkan ke publik.

Sedangkan elemen yang dinilai oleh MTRCB memiliki kemiripan dengan LSF, yaitu: tema, bahasa, ketelanjangan, seks, kekerasan, horor, dan napza. Suasana diskusi berjalan santai meski membicarakan hal-hal krusial mengenai kebijakan dan tantangan penentuan klasifikasi usia, serta perkembangan tontonan di jaringan Over The Top (OTT).




**UNDANG MTRCB KE INDONESIA.** Peningkatan kerja sama.

Sebelum berpisah, LSF menyampaikan inisiasi dan sekaligus mengundang MTRCB untuk ikut serta dalam pertemuan Lembaga klasifikasi film serupa se-Asia Tenggara yang akan diadakan di Indonesia. “Kami senang dan merasa terhormat atas kunjungan LSF Republik Indonesia, semoga kerja sama kedua lembaga dapat semakin ditingkatkan” ujar Lala Soto, panggilan akrab Chairwoman MTRCB. Sesi ditutup dengan foto bersama dan tour ke studio pemantauan yang diarahkan oleh wakil ketua MTRCB yang akrab dipanggil Chair Cases. **(Tin)**

# Vina: Sebelum 7 Hari antara Fakta dan Film

Suhartini.




FILM "Vina: Sebelum 7 Hari" viral di media sosial, media online bahkan media arus utama. Karena info media tersebut, film Vina tembus hingga 5 juta penonton lebih. Pro dan kontra tanggapan masyarakat pun muncul. Banyak masyarakat yang memuji film tersebut karena dapat mendorong pengungkapan fakta baru dari kasus yang telah terkubur selama 8 tahun lebih. Ada pula masyarakat yang tidak senang lalu mengatakan film ini telah membuat kegaduhan sehingga harus ditarik dari pasaran.

Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) bahkan datang ke Lembaga Sensor Film (LSF) dan meminta Ketua LSF periode 2020-2024, Rommy Fibry agar segera menarik film tersebut dari peredaran serta meminta LSF membatalkan STLS yang dikeluarkan. Alasannya adalah akibat film Vina, telah terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat .

Permintaan tersebut tentunya tidak dapat langsung dikabulkan. Penarikan film dan iklan film regulasinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Bagian Kelima pasal 38 (1) yang menyebutkan: Film dan iklan film yang sudah lulus sensor dapat ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan

pertimbangan LSF apabila menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat.

Heboh dan gaduh di media tidak dapat diartikan telah menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman bahkan keselarasan hidup masyarakat. LSF mencoba memberikan pemahaman kepada ALMI. Kedatangan ALMI disambut baik dan diakomodir LSF. Dalam dialog ini LSF juga menjelaskan tentang Permendikbud No.14 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan film dan iklan film dari peredaran. Pada pasal 28 (1) Bab V di Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan film dan iklan film yang sudah lulus sensor yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat. Laporan dapat disampaikan secara langsung maupun daring.

**LSF menggelar Siaran Pers**

Ketua LSF Rommy Fibry bersama Ketua Komisi I Bidang Penyensoran, Nasrullah telah menjelaskan kepada ALMI tentang mengapa LSF meloloskan film "Vina: Sebelum 7 hari" dengan klasifikasi usia penonton 17 tahun ke atas. Begitu juga dijelaskan tentang berbagai kriteria tertentu terkait film yang sudah tayang untuk direkomendasikan oleh LSF kepada Mendikbudristek agar menarik film dan iklan film dari peredaran.

LSF kemudian menggelar siaran Pers, pada Senin 3 Mei 2024 agar masyarakat dapat memahami tentang mengapa film "Vina: Sebelum 7 Hari" lulus sensor. Dalam siaran persnya, Nasrullah menjelaskan ada beberapa kriteria film untuk diloloskan dengan klasifikasi usia 17 tahun ke atas dengan kode D.17. Syaratnya, film itu sesuai dengan psikologi usia 17 tahun ke atas yang telah mampu menimbang baik dan buruk dari materi yang ditonton. Jika ada unsur kekerasan dan sensualitas di dalam film, disajikan secara proposional serta tidak berlebihan.

Nasrullah menilai adegan kekerasan yang diambil oleh sutradara Anggy Umbara masih dalam batasan proposional untuk klasifikasi usia 17 tahun ke atas. Sementara adegan pemerkosaan Vina juga ditampilkan tidak vulgar, masih sesuai dengan ketentuan yang ada. Rommy juga menambahkan: "Kalau film sekelas itu adegannya diberi klasifikasi semua umur, nah itu tentu bermasalah!"

**Antara Fakta dan Film**

Film "Vina: Sebelum 7 Hari" bercerita tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Cirebon pada 2016. Anggy Umbara terinspirasi dari kisah nyata tragedi pembunuhan sepasang kekasih yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di jalan layang di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi awalnya menduga sejoli itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan fakta pada luka-luka yang terlihat di tubuh korban, membuat polisi curiga bahwa Vina dan Rizky adalah korban pembunuhan. Kemudian dilakukan proses penyelidikan hingga penyidikan lebih lanjut hingga mendapatkan 11 orang tersangka pembunuhan. Polisi telah menangkap 8 orang pelaku. 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 orang yang masih dibawah umur mendapat vonis 8 tahun penjara. 3 orang lainnya menjadi DPO. Delapan tahun kemudian, begitu film Vina menjadi viral, 3 DPO yang hilang dan tak kunjung ditangkap menjadi pemberitaan hangat di media sosial, media online maupun media cetak.

Adegan yang ditampilkan dalam sebuah film fiksi adalah karya seni yang merupakan interpretasi kreatornya. Film Vina bukan sebuah reka adegan fakta yang direkam dalam bentuk audio visual. "Vina: Sebelum 7 Hari" adalah sebuah film fiksi bergenre horor yang terinspirasi dari kisah nyata. Pembuat film horor tentunya berupaya untuk menciptakan suasana yang meyakinkan, menakutkan, dan menegangkan, sehingga memunculkan rasa yang memacu andrenalin penontonnya. Realita pada film Vina hanyalah realita dalam cerita film semata. Realita dalam film Vina bisa saja berbeda dengan realita dalam kisah sesungguhnya pada kejadian 2016 di Cirebon.



Realita dalam film merujuk pada bagaimana film merepresentasikan dunia nyata, peristiwa, karakter, dan situasi secara visual dan naratif. Namun, "realita" dalam film tidak selalu berarti bahwa film tersebut menggambarkan dunia secara apa adanya, melainkan bagaimana pembuat film memanipulasi elemen-elemen sinematik untuk menciptakan sebuah dunia yang bisa terasa nyata, fiksi, atau bahkan fantasi. Ada beberapa pendekatan terhadap realita dalam film, tergantung pada genre, tujuan, dan gaya penceritaan film tersebut.

Realita yang ditampilkan dalam film juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap realitas sosial di masyarakat. Film memiliki kemampuan untuk mencerminkan, membentuk, dan bahkan mendorong perubahan sosial, karena ia merupakan media yang sangat kuat dalam menyampaikan ide, nilai, dan perspektif. Film dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu. Ketika sebuah film dengan narasi kuat tentang keadilan sosial, gender, atau etnisitas ditonton oleh banyak orang, ia dapat memengaruhi pandangan publik terhadap isu-isu tersebut.

Dalam UU Perfilman No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman jelas dinyatakan, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Karena sebuah pranata sosial, sutadara maupun penulis skenario film sering mengangkat tema-tema yang merupakan kisah nyata yang ditulis dalam sebuah novel maupun kisah-kisah viral yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun sebuah film diangkat dari kisah nyata dan kasus-kasus viral, namun adegan-adegan dalam film merupakan karya sinematografi yang merupakan penafsiran imajinatif sutradara dan tim produksinya dari skenario film.

Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi kreatif, sutradara pada umumnya membuat karya film dengan tujuan mendapatkan jumlah penonton sebanyak-banyaknya agar mendatangkan keuntungan demi keberlangsungan produksi film selanjutnya. Kegiatan perfilman dan usaha



perfilman dilindungi undang-undang, mereka bebas berkreasi, berinovasi dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa. Dalam UU juga dijelaskan bahwa film dan iklan film yang beredar wajib lulus sensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor (STLS). STLS diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film setelah dilakukan proses penyensoran, meliputi; Penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Kemudian ditentukan kelayakan film dan iklan film tersebut serta diberikan kategori usia penontonnya, apakah Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas (R13), 17 tahun ke atas (D17) atau 21 tahun ke atas (D21).

Penggolongan usia penonton diatur dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film dan Permendikbud No.14 tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton dan penarikan film dan iklan film dari peredaran.

Film Vina telah diberi klasifikasi 17 tahun ke-atas, yaitu sebuah film yang ditujukan untuk dewasa usia 17 tahun ke-atas, yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial, budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Film dan iklan film yang diberi klasifikasi kode D17 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari remaja ke dewasa. Namun pada fenomena yang terjadi di bioskop di seluruh Indonesia, setelah menjadi viral, film Vina juga ditonton anak-anak usia di bawah 17 tahun. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar menjaga keluarga kita dari tontonan yang sesuai dengan kategorisasi usia. Masyarakat diminta membudayakan diri menonton sesuai usia, seperti yang selalu dihimbau LSF keseluruh masyarakat Indonesia melalui Gerakan Budaya Sensor Mandiri. (Erb)

R13

PENULIS : TANTO WARDOYO

| | |
|---|---|
| Judul | : **Kaka Boss** |
| Tema | : Perjuangan preman menjadi penyanyi atas keinginan putrinya |
| Genre | : Drama |
| Penggolongan Usia | : 13+ |
| Kandungan | : Hiburan |
| Produksi | : Imajinari Pictures |
| Negara | : Indonesia |
| Durasi | : 121 menit |
| Tahun | : 2024 |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Produser | : Ernest Prakasa, Dipa Andika |
| Sutradara | : Arie Kriting, Kristo Immanuel |
| Penulis Skenario | : Arie Kriting |
| Penata Kamera | : Arfian |
| Penyunting Gambar | : Teppan Kobain |
| Penata Artistik | : Angga Prasetyo, Eko Widar |
| Penata Musik | : Saykoji, Alden Luhukai |
| Lokasi | : Jakarta |
| Pemeran | : Godfred Orindeod, Ferdinand Omakare, Ernest Prakasa, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, Nowela Elizabeth Auparay, Putri Nere, Elsa Japasal, Aurel Mayori |




SEORANG bos *debt collector* bernama Kaka Boss (Godfred Orindeod), adalah preman yang sangat disegani. Sekeluar dari penjara, penagih utang yang ganas asal Indonesia Timur, itu mendadak bertaubat. Ia ingin beralih profesi. Ia ingin memberi kebanggaan kepada putri semata wayangnya, sekaligus mewujudkan cita-citanya ketika muda: menjadi penyanyi. Permasalahannya, suara Kaka Boss sumbang. Namun, tidak seorang pun berani buka suara. Termasuk anak buahnya yang setia yaitu Reggae (Mamat Alkatiri), Gafur (Abdur Arsyad), dan Billy (Reynold Lawalata). Ia pun meminta tolong kepada produser musik yang juga mantan nasabah yang pernah ditagihnya, Alan (Ernest Prakasa), untuk dapat mewujudkan keinginannya itu.

Film yang diproduksi oleh rumah produksi yang sama dengan film *Agak Laen,* ini diisi deretan artis asal Indonesia Timur. Salah satunya adalah penyanyi jebolan Indonesian Idol 2014 dari Papua Timur, Nowela Elisabeth Auparay. Film ini berhasil meraih perhatian penonton dengan mengusung genre komedi-musik yang unik. Terhitung dalam 18 hari penayangan, melalui laman resmi Instagram Film Kaka Boss pada 16 September 2024, film ini telah berhasil menggaet 762.043 penonton di seluruh bioskop Indonesia. Film yang mengangkat sisi lain kehidupan keluarga Indonesia Timur yang hangat, ini oleh Lembaga Sensor Film diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. **(tw)**

R13

**PENULIS : FATKHURROZAQ**

| | |
|---|---|
| Judul | : **Kang Mak From Pee Mak** |
| Tema | : Tentara pulang perang yang tidak tahu istrinya telah menjadi hantu |
| Genre | : Horor, Komedi |
| Penggolongan Usia | : 13+ |
| Kandungan | : Hiburan |
| Produksi | : Falcon Pictures |
| Negara | : Indonesia |
| Durasi | : 122 Menit |
| Tahun | : 2024 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Tayang | : 15 Agustus 2024 |
| Produser | : Frederica, Smt. Vinita Bharwani, Sri Hiroo Bharwani, H.B. Naveen, Dallas Sinaga |
| Sutradara | : Herwin Novianto |
| Penulis Skenario | : Chantavit Dhanasevi, Nontra Kumwong, Banjong Pisanthanakun |
| Penata Kamera | : Edi Michael Santoso |
| Penyunting Gambar | : Ryan Purwoko |
| Penata Artistik | : Wencislaus |
| Penata Musik | : Fajar Ahadi |
| Pemeran | : Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna |




KANG Makmur (Vino G. Bastian) pulang dari medan perang bersama empat teman seperjuangannya yaitu Supra (Indro Warkop), Jaka (Tora Sudiro), Fajrul (Indra Jegel), dan Solah (Rigen Rakelna). Kang Makmur sangat bahagia mendapati istrinya, Sari (Marsha Timothy), dan anaknya berada di rumah. Padahal, Sari sesungguhnya sudah meninggal dan menjadi arwah gentayangan, yang membuat warga kampung ketakutan.

*Kang Mak From Pee Mak* merupakan *remake* dari film *box office* Thailand *Pee Mak* (*Phi Mak Phra Khanong*) karya Banjong Pisanthanaku (2013). Film Kang Mak From Pee Mak berhasil meraih jumlah total penonton sebanyak 5.815.492 orang. Pencapaian ini membuat film ini berpotensi menjadi salah satu film terlaris Indonesia tahun 2024. Dalam 10 hari tayang, Kang Mak From Pee Mak ini berhasil menyedot 1,492.000 penonton setelah 5 hari tayang, dan 2,6 juta penonton dalam 10 hari tayang. Kemudian dalam 2 minggu, tercatat sebanyak 3,4 juta penonton, pencapaian 4 juta penonton berhasil ditorehkan setelah film ini bertengger selama 19 hari di Bioskop. Film horor dan komedi ini oleh Lembaga Sensor Film diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. (**fat**)

R13

PENULIS : MILLA SETIAWATI

| | |
|---|---|
| Judul | : **Thaghut** |
| Tema | : Fenomena sekte sesat di sebuah desa |
| Genre | : Horor/ Thiller /Misteri |
| Penggolongan Usia | : 13+ |
| Kandungan | : Hiburan |
| Produksi | : Leo Pictures |
| Negara | : Indonesia |
| Durasi | : 102 Menit |
| Tahun | : 2024 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Tayang | : 29 Agustus 2024 |
| Produser | : Agung Saputra, Farell Diva Bramanta, Nunu Datau, Mohit Nv |
| Sutradara | : Bobby Prasetyo |
| Penulis Skenario | : Lele Laila |
| Penata Kamera | : Ujel Bausad |
| Penyunting Gambar | : Firdauzi Trizkiyanto |
| Penata Artistik | : Edy Wibowo |
| Penata Musik | : Aghi Narottama |
| Penata Suara | : Rehyan Malik Putranto, Ferry Setiawan, |
| Distribusi | : GSC Movies (GSCM) (Malaysia 2024), Golden Screen, Cinemas (Malaysia 2024) |
| Pemeran | : Yasmin Napper, Arbani Yasiz, Ria Ricis, Whani Darmawan, Dennis Adhiswara, Hana Sarawati, Keanu Azka J:M.Ikhsan Sungkar |



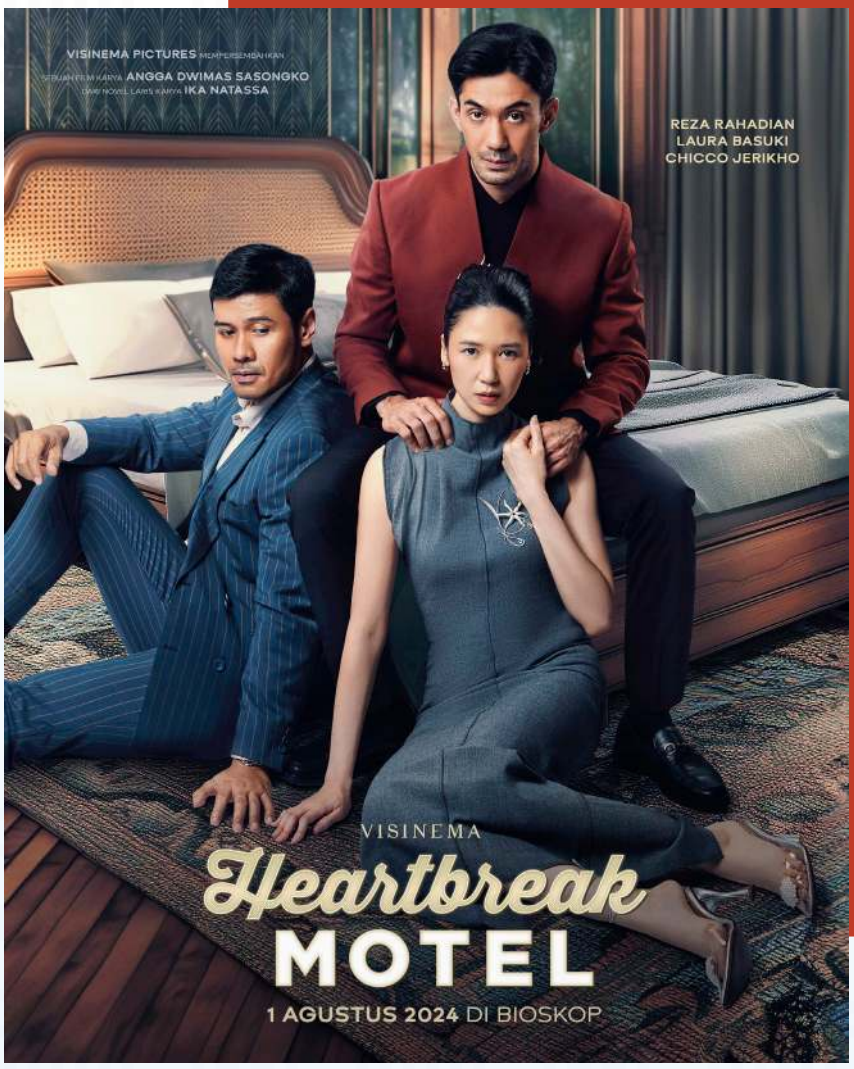

SANTRIWATI bernama Ainun (Yasmin Napper) bersama kedua temannya Bagas (Arbani Yasiz) dan Rini (Ria Ricis), meningggalkan pesantren menuju Desa Bumi Suwung. Mereka melayat almarhum Abah Mulya (Whani Darmawan) yang ternyata adalah bapak kandung Ainun. Abah Mulya adalah pemilik Padepokan di Desa Bumi Suwung yang terkenal dengan kesaktiannya menyembuhkan pelbagai penyakit. Tak aneh jika sosok abah dikagumi oleh penduduk desa. Namun, setiba di padepokan, Ainun banyak melihat dan mengalami kejanggalan dan peristiwa mistis di desa itu. Warga desa seakan menutup mata terhadap praktek ajaran sesat yang dilakukan Abah Mulya. Ainun pun berada dalam posisi dilematis berada di lingkungan sesat yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Terlebih, Abah Mulya mewasiatkan agar Ainun menjadi penerusnya.

Film ini semula berjudul *Kiblat*. Setelah menuai kontroversi dari beberapa pihak, karena dinilai melakukan penistaan agama, Leo Pictures selaku rumah produksi akhirnya secara resmi mengganti judulnya menjadi *Thaghut,* yang dalam Islam memiliki arti melampaui batas, sesuatu yang disembah selain Tuhan. Jumlah penonton film Thaghut pada 24 September 2024 adalah 922.726 penonton dan bertahan hingga 21 hari tayang. LSF mengklasifikasikan film ini untuk penonton usia 13 tahun ke atas. **(mil)**

D17

PENULIS : CARLA HELSI ANDINA

| | |
|---|---|
| Judul | : **Heartbreak Motel** |
| Tema | : Kekerasan |
| Genre | : Drama |
| Penggolongan usia | : 17+ |
| Kandungan | : Hiburan |
| Produksi | : Visinema Pictures |
| Durasi | : 115 menit |
| Negara | : Indonesia |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Distributor | : Visinema Pictures |
| Tayang | : 1 Agustus 2024 |
| Produser | : Kori Adyaning |
| Sutradara | : Angga Dwimas Sasongko |
| Penulis Skenario | : Alim Sudio, Angga Dwimas Sasongko |
| Penata Kamera | : Arnand Pratikno |
| Penyunting Gambar | : Hendra Adhi Susanto |
| Penata Musik | : Abel Huray |
| Pemeran | : Laura Basuki, Reza Rahadian, Chicco Jerikho, Sheila Dara Aisha, Pierre Gruno, Sita Nursanti |



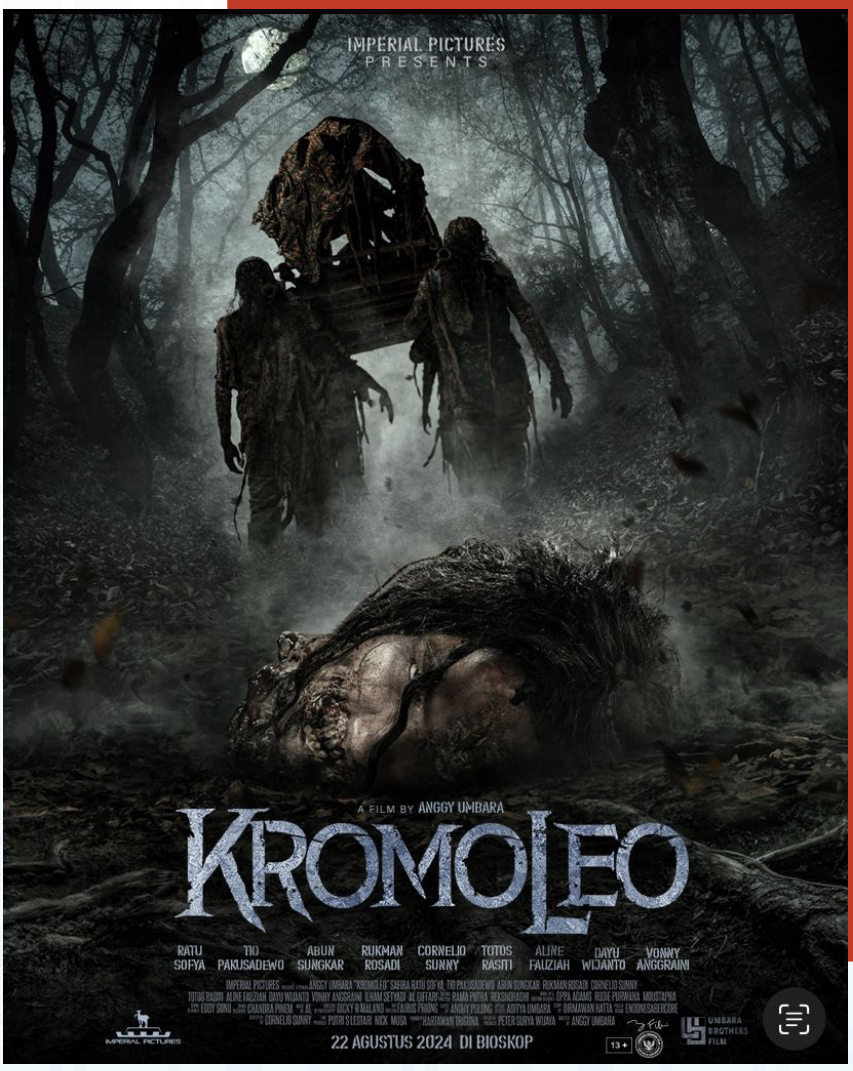

AVA Alessandra (Laura Basuki) adalah aktris dengan masa lalu yang kelam. Waktu kecil ia selalu menyaksikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Saat trauma itu mengganggu pekerjaannya sebagai aktris, Reza Malik (Reza Rahadian) mendampingi Ava melewati masa-masa sulitnya. Namun, ketika masalah baru muncul dalam hubungan mereka, Ava bertemu dengan Raga (Chicco Jerikho), lelaki yang ditemuinya saat ia mengasingkan diri.

*Heartbreak Motel* adalah adaptasi dari novel karya Ika Natassa, yang novel lainnya juga tahun ini dibikin film: *The Architecture of Love*. Novel-novel Ika Natassa lainnya yang sudah difilmkan antara lain, *Critical Eleven, Divortiare*, dan *Antologi Rasa.* Sejak film ini rilis pada 1 Agustus 2024, berhasil meraup penonton dalam minggu awal setelah rilis berjumlah 55.544 orang. Totalitas Laura Basuki dalam membintangi film ini menjadi buah bibir Warganet, karena mengenakan pakain seharga ratusan juta hingga perhiasan senilai 5 Miliar. LSF mengjklasifikasikan *Heartbreak Motel* untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Bijaklah memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia. (**cha)**

D17

PENULIS : RUDIYANTO

| | |
|---|---|
| Judul | : **Kromoleo** |
| Tema | : Teror Hantu Keranda Mayat |
| Genre | : Horor, Triller |
| Penggolongan usia | : 17+ |
| Kandungan | : kekerasan |
| Produksi | : Imperial Pictures |
| Durasi | : 80 menit |
| Tahun | : 2024 |
| Negara | : Indonesia |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Tayang | : 2024 |
| Produser | : Hartawan Triguna, Peter Surya Wijaya |
| Sutradara | : Anggy Umbara |
| Penulis Skenario | : Rola Rahmita |
| Penata Kamera | : Awang JJ |
| Penyunting Gambar | : Andhy Pulung, Johan Leonardo |
| Penata Artistik | : Fairus Phiong |
| Penata Musik | : AL |
| Penata Suara | : Oki Nugros, Baim Ngapak, Guntur Pamungkas |
| Pemeran | : Ratu Sofya, Tio Pakusadewo, Rukman Rosadi, Cornelio Sunny, Abun Sungkar, Dayu Wijanto, Aline Fauziah |



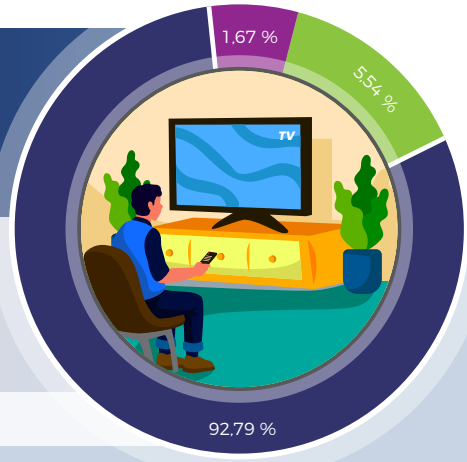

SEPULUH tahun sejak ayahnya pergi, Zia (Ratu Sofya), didampingi kekasihnya, Dika (Abun Sungkar), bersikeras pulang ke kampung halaman guna menghadiri pemakaman ibunya. Selain itu, Zia memiliki misi lain, yakni untuk mengungkap kebenaran tentang ayahnya. Kakek Zia, Danang (Tio Pakusadewo), yang tidak senang dengan kehadiran Zia di desa, itu mendesaknya agar segera kembali ke kota, sebelum bencana kutukan Kromoleo melanda.

Di kalangan masyarakat desa sekitar Majenang, legenda tentang Kromoleo telah mengakar kuat. Dipercaya bila Kromoleo melintasi suatu wilayah, nasib buruk dapat menimpa warga setempat, bahkan menyebabkan kematian. Mitos itu juga berhubungan erat dengan Gunung Merapi, di mana Kromoleo dianggap sebagai entitas astral yang mengantar roh para jenazah, dan dapat merenggut nyawa siapa saja yang melihatnya. Anggy Umbara adalah sutradara yang sukses antara lain dengan *Bernapas dalam Kubur* (2018), *Satu Suro* (2019), *Si Manis Jembatan Ancol* (2019), *Siksa Neraka* (2023), *Munkar* (2024), dan yang terbaru *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024). Jumlah penonton film Kromoleo adalah: 101.029 penonton pada 27 Agustus 2024, dan film ini berhasil mendapat 33.153 penonton dalam 1 malam. Film *Kromoleo* yang mengandung adegan kekerasan, pertumpahan darah, dan atmosfer mencekam, ini oleh Lembaga Sensor Film diklasifikasikan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Bijaklah memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia.**(ian)**

# DATA SENSOR
# JULI 2024

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

## TELEVISI

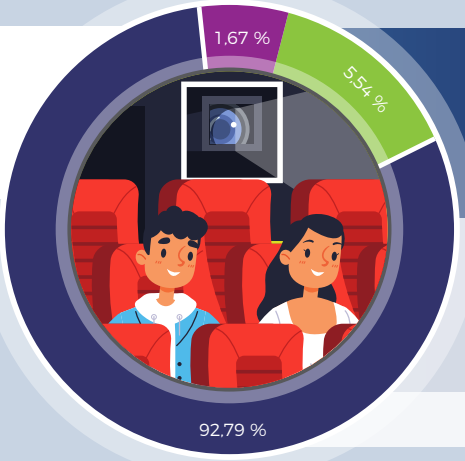



KATEGORI
**TELEVISI**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

**NASIONAL** : 1551
**IMPOR** : 1396
**JUMLAH** : 2947
**PROSENTASE** : 92,79 %

## LAYAR LEBAR

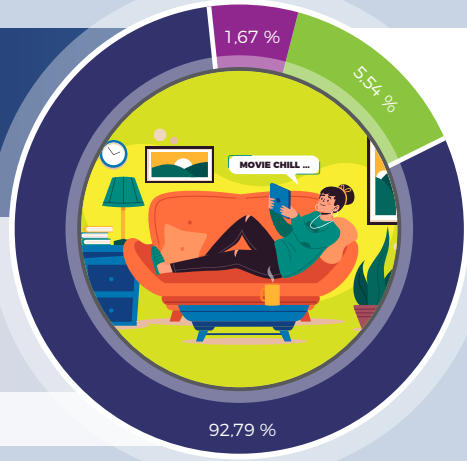



**NASIONAL** : 30
**IMPOR** : 23
**JUMLAH** : 53
**PROSENTASE** : 1,67 %

KATEGORI
**LAYAR LEBAR**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

## JARINGAN INFORMATIKA, DLL




KATEGORI
**JARINGAN INFORMATIKA,DLL**

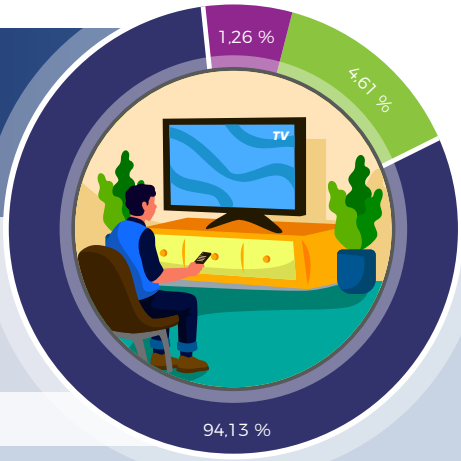
- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

**NASIONAL** : 126
**IMPOR** : 50
**JUMLAH** : 176
**PROSENTASE** : 5,54 %

# DATA SENSOR
# AGUSTUS 2024

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

## TELEVISI

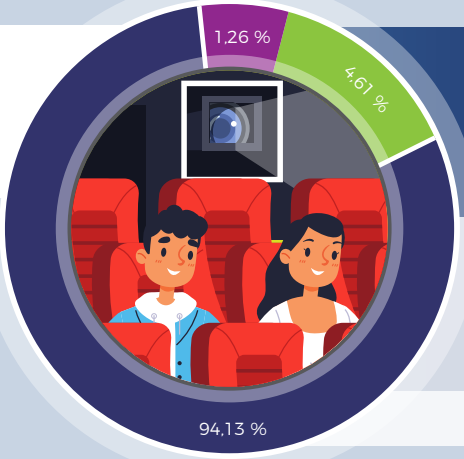



KATEGORI
**TELEVISI**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

**NASIONAL** : 1610
**IMPOR** : 923
**JUMLAH** : 2533
**PROSENTASE** : 94,13 %

## LAYAR LEBAR

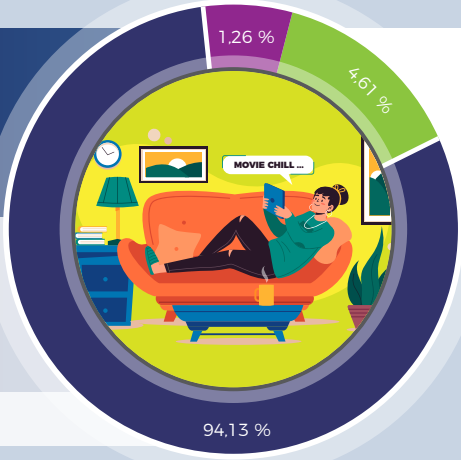



**NASIONAL** : 15
**IMPOR** : 19
**JUMLAH** : 34
**PROSENTASE** : 1,26 %

KATEGORI
**LAYAR LEBAR**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

## JARINGAN INFORMATIKA, DLL




KATEGORI
**JARINGAN INFORMATIKA,DLL**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

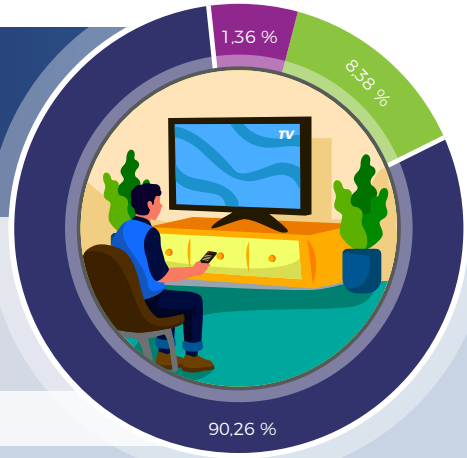
**NASIONAL** : 74
**IMPOR** : 50
**JUMLAH** : 124
**PROSENTASE** : 4,61 %

# DATA SENSOR
# SEPTEMBER 2024

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

KATEGORI
**TELEVISI**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

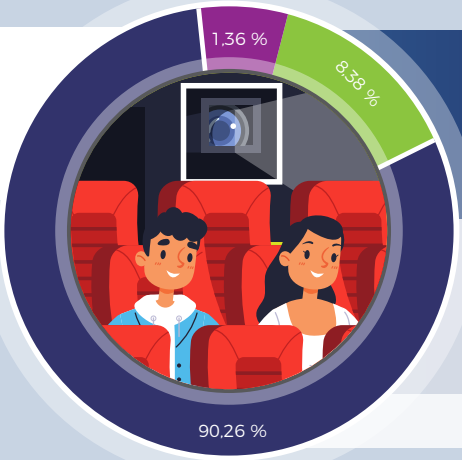



## TELEVISI

| | | |
|---|---|---|
| **NASIONAL** | : | 1488 |
| **IMPOR** | : | 1033 |
| **JUMLAH** | : | 2521 |
| **PROSENTASE** | : | 90,26 % |

## LAYAR LEBAR

| | | |
|---|---|---|
| **NASIONAL** | : | 16 |
| **IMPOR** | : | 22 |
| **JUMLAH** | : | 38 |
| **PROSENTASE** | : | 1,36 % |

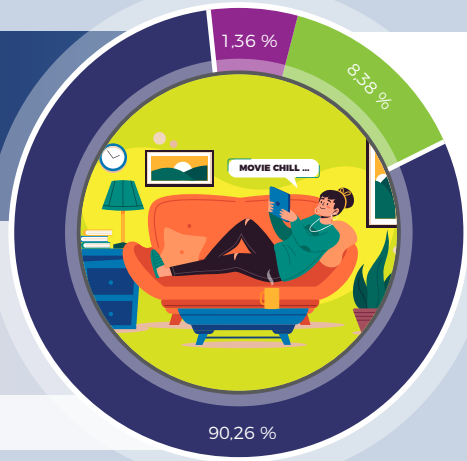



KATEGORI
**LAYAR LEBAR**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.

KATEGORI
**JARINGAN INFORMATIKA,DLL**

- Televisi
- Layar Lebar
- Jaringan Informatika, dll.




## JARINGAN INFORMATIKA, DLL

| | | |
|---|---|---|
| **NASIONAL** | : | 103 |
| **IMPOR** | : | 131 |
| **JUMLAH** | : | 234 |
| **PROSENTASE** | : | 8,38 % |

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

# Sensor Mandiri Sebelum Kena Sensor




PRODUKSI FILM YANG LEBIH BAIK, LEBIH MENDIDIK,
LEBIH BERTANGGUNG JAWAB

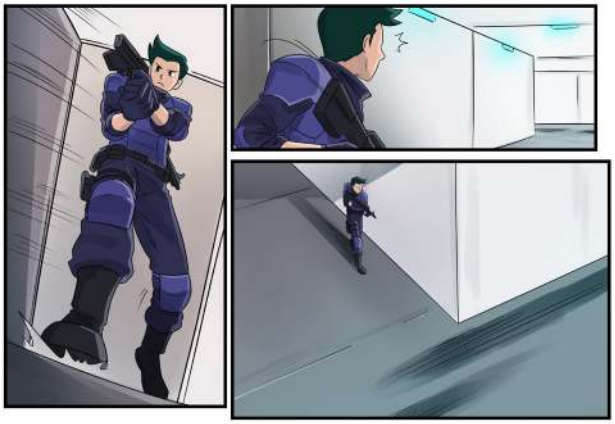
LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

# KECANDUAN GAME

















GO!
GO!
DRT
DRT
DRT
DRT
Komandan lihat!


DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT


Pelanggan yang terhormat,
Paket Internet anda telah habis.
Untuk aktivasi paket, silahkan hubungi costumer service.
AAARGH!!
PTAK


Irsa kenapa?
kamu jadi gampang marah gara-gara kebanyakan game online. Mestinya banyakin main sama temen-temen kamu di luar.
Ingat waktu dan MMT
Memilah, Memilih, Tontonan Sensor Mandiri.
LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
SENSOR MANDIRI
Ayo Memilah & Memilih Tontonan
SU
13+
17+
21+

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

# MEMILAH MEMILIH TONTONAN




ISSN 2962-956X